LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KEMANTREN GONDOMANAN

TAHUN 2023

Disusun oleh:

Kemantren Gondomanan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

Jl. Brigjen Katamso No 93 Yogyakarta Kode Pos: 55121 Telp.(0274)376783 Fax (0274)376783
EMAIL: gm@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001
HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kemantren Gondomanan Tahun 2023 dapat tersusun. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah atasan dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya. Dengan demikian transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tuntutan di era ekonomi daerah sekarang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya instansi pemerintah ini diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya *Good Governance.*

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan motivasi kerja bagi Kemantren Gondomanan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, maka saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.

Yogyakarta, Januari 2024
Mantri Pamong Praja Gondomanan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

Cahya Wijayanta, S.Sos
NIP.19701119 199603 1 003

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kemantren Gondomanan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah atasan dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya.

Sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 adalah : Pertama, **nilai perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat**, dan Kedua, **nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat**. Sasaran Pertama dicapai melalui 5 (lima) sasaran antara yaitu : (1) terlaksananya Gelar Budaya Jogja, (2) nilai survei kepuasan masyarakat meningkat, (3) nilai swadaya murni masyarakat meningkat, (4) jumlah pelanggaran Perda menurun, dan (5) terselesaikannya permasalahan sebagai hasil koordinasi; sedangkan sasaran Kedua dicapai dengan 1 (satu) sasaran antara yaitu akuntabilitas kinerja Kemantren Gondomanan meningkat.

Secara umum kinerja Kemantren Gondomanan di tahun 2023 dalam mencapai sasaran yang ditetapkan masuk dalam kriteria Sangat Tinggi (diatas 91%). Sasaran strategis nilai perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat tercapai 368,3 dari target 368 (capaian kinerja 100,082%). Sasaran antara dan capaiannya :

1) terlaksananya Gelar Budaya Jogja tercapai 1 (satu) kali dari target 1 (satu) kali (capaian kinerja 100%)
2) nilai survei kepuasan masyarakat tercapai 88,68 dari target 88,62 (capaian kinerja 100,068%);
3) angka swadaya masyarakat tercapai Rp1.039.317.000,- dari target Rp1.032.240.000,- (capaian kinerja 100,686%);
4) jumlah pelanggaran Perda menurun dari target 140 terjadi 136 kali (capaian kinerja 102,86%);

5) prosentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi tercapai 100% dari target 100% (capaian kinerja 100%).

Sedangkan sasaran strategis nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan tercapai nilai AA (90,83%) dari target A(81) atau prosentase capaian 121,358%, dengan sasaran antara nilai SAKIP tercapai 88,455 (Sangat Baik) dari target 80,00 (Baik) atau prosentase capaian 110,57%.;

Kinerja keuangan tahun 2023 Kemantren Gondomanan juga sangat tinggi, dari target anggaran Rp8.411.902.843,- terealisasikan Rp8.142.792.394,- dengan prosentase capaian 96,80%.

Faktor kunci yang menjadi pendorong keberhasilan kinerja Kemantren Gondomanan di tahun 2023 antara lain adalah : ketersediaan anggaran yang semakin memadai; kualitas dan kompetensi SDM yang makin meningkat, efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi; inovasi sistem dan prosedur pelayanan; pemanfaatan teknologi informasi; dan penerapan sistem *reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai. Selain itu dukungan faktor eksternal seperti : peran lembaga sosial kemasyarakatan; partisipasi dan swadaya masyarakat yang tinggi; dan sinergitas antar lembaga dalam Forum Komunikasi Pimpinan kemantren (Forkompimtren) Gondomanan juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan keberhasilan pencapaian tujuan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar viii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 3
C. Gambaran Umum Kemantren Gondomanan 4
1. Kondisi Wilayah 5
2. Struktur Organisasi 8
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 9
4. Isu-isu Strategis Organisasi 12
a. Pelayanan Masyarakat 12
b. Pemberdayaan Masyarakat 14
c. Pembangunan Kewilayahan 15
d. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan..... 16
e. Keterbukaan Informasi Publik 17
f. Reformasi Birokrasi 18
g. Dana Keistimewaan 20
h. Darurat Sampah Akibat Penutupan TPA Piyungan 21
5. Keadaan Pegawai 22
6. Keadaan Sarana Prasarana dan Keuangan 24
D. Sistematika Penyajian 25

BAB II PERENCANAAN KINERJA 27
A. Perencanaan Strategis 2022-2026 27
1. Visi dan Misi Kepala Daerah 28
2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 29
a. Tujuan 29

b. Sasaran Strategis 30
3. Strategi dan Arah Kebijakan 30
a. Kebijakan..... 30
b. Program, Kegiatan dan Subkegiatan 38
B. Perjanjian Kinerja 42
C. Rencana Anggaran Tahun 2023..... 43
1. Target Belanja Kemantren Gondomanan 44
2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 44

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 45
A. Capaian Kinerja Organisasi..... 45
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023..... 45
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.. 54
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra..... 58
4. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Standar Nasional/ Organisasi Sejenis 59
5. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis 60
a. Sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan Meningkat 60
b. Sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan Meningkat 66
6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan 68
7. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 72
8. Analisis Program Kegiatan yang yang Terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 75
9. Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja 76

B. Realisasi Anggaran 78
1. Penyerapan Anggaran 78
2. Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya 80
C. Inovasi dan Prestasi..... 85
1. Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja 85
2. Prestasi 88
D. Tindak Lanjut Rekomendasi LKIP Tahun 2022 89

BAB IV PENUTUP 92
A. Kesimpulan..... 92
B. Rencana Tindak Lanjut..... 92

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Kemantren Gondomanan Tahun 2023 6
Tabel I.2 Jumlah RW dan RT Kemantren Gondomanan 6
Tabel I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin 22
Tabel I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 23
Tabel I.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin..... 24
Tabel I.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon 24

Tabel II.1 Ringkasan Visi Misi Renstra Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ... 28
Tabel II.2 Tujuan dan Sasaran kemantren Gondomanan Tahun 2023 29
Tabel II.3 Sasaran Strategis Kemantren Gondomanan 30
Tabel II.4 Sasaran Strategis, Sasaran Antara, Program, Kegiatan dan subkegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2023 39
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2023..... 42
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.... 43
Tabel II.7 Target Belanja Kemantren Gondomanan APBD Perubahan Tahun 2023 43
Tabel II.8 Anggaran Belanja Non Pegawai Per Sasaran Strategis.... 44

Tabel III.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan 46
Tabel III.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja 46
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 47
Tabel III.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran/ Tujuan 47
Tabel III.5 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program 49
Tabel III.6 Data Nilai Swadaya Murni Masyarakat Tahun 2023 51

Tabel III.7 Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun Anggaran 2023 53
Tabel III.8 Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 54
Tabel III.9 Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023 dengan tahun-tahun Sebelumnya..... 56

Tabel III.10 Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya 2023 57
Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir Renstra 58
Tabel III.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan target Renstra 59
Tabel III.13 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Instansi/Organisasi Sejenis 60
Tabel III.14 Nilai Unsur Pelayanan 62
Tabel III.15 Permasalahan yang Dibahas dalam Rapat Koordinasi Forkompimtren Gondomanan Tahun 2023 66
Tabel III.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Kemantren Gondomanan Tahun 2023 78
Tabel III.17 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2023 79
Tabel III.18 Data Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2023 77
Tabel III.19 Rekomendasi Inspektorat terhadap LKIP Tahun 2022 dan Tindaklanjutnya 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kemantren Gondomanan 5

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan 8

Gambar 3. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu..... 57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan
Lampiran 2	Perencanaan Strategis (Matriks Renstra Lima Tahun)
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Lampiran 4	Pohon Kinerja
Lampiran 5	Pengukuran Kinerja Triwulan I-IV (print SIM e-LAKIP)
Lampiran 6	Rencana Aksi (print dari e-LAKIP)
Lampiran 7	Penghargaan yang Pernah Diterima
Lampiran 8	Tabel I.7 Data Sarana dan Prasarana Kemantren Gondomanan
Lampiran 9	Tabel I.8 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kemantren Gondomanan Tahun 2023
Lampiran 10	Berita Acara Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan se Kemantren Gondomanan Tahun 2023
Lampiran 11	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Lampiran 12	Rekapitulasi Laporan Swadaya Murni Kelurahan Tahun 2023
Lampiran 13	Rekapitulasi Laporan Kegiatan Tramtibum
Lampiran 14	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
Lampiran 15	Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2022
Lampiran 16	Matriks Cascading SKP Tahun 2023
Lampiran 17	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Instansi Sejenis
Lampiran 18	Daftar Nominatif Pegawai Kemantren Gondomanan Tahun 2023
Lampiran 19	Berita Acara Forum OPD Kemantren Gondomanan Tahun 2023
Lampiran 20	Berita Acara Review Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan transparansi atau keterbukaan dalam pemerintahan menjadi hal yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Oleh karena itu transparansi dipandang menjadi suatu keharusan untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja hal itu juga sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka, seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi informasi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntunan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita- cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good* and *services* disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (kepemerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya " *alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* juga merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN).

Instansi pemerintah harus bertanggung jawab (*accountable*) dan melaporkan kinerjanya kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya untuk mewujudkan suatu instansi pemerintah yang senantiasa memperbaiki kinerjanya secara terus menerus dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun sebagai manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang selain sebagai bahan evaluasi capaian dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023-2026;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Gondomanan ini adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kemantren Gondomanan secara jelas, transparan dan akuntabel.
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun anggaran 2023 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Gondomanan ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2023;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya; dan
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kemantren Gondomanan dalam penerapan azas profesional, transparan dan akuntabel.

C. Gambaran Umum Kemantren Gondomanan

Kemantren Gondomanan merupakan salah satu kemantren di Kota Yogyakarta dengan luas 112.00 Ha dan terdiri dari 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan. Jumlah penduduk Kemantren Gondomanan pada akhir tahun 2023 adalah sebesar 14,481 jiwa terdiri atas 6.994 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 7.487 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Dengan luas dan jumlah penduduk tersebut maka tingkat kepadatan penduduk Kemantren Gondomanan menjadi 12.929 jiwa/km2.

Secara geografis posisi Kemantren Gondomanan berada di jantung

Kota Yogyakarta, menjadi pusat perekonomian Yogyakarta yang terkenal dengan kawasan Malioboro, Pasar Beringharjo, Alun-alun Utara dan Titik Nol Kilometer. Gondomanan juga masih memiliki gedung-gedung peninggalan sejarah bangunan cagar budaya seperti Benteng Vredeburg, Gedung Agung/Istana Negara, Bank Indonesia, Kantor Pos, Bank BNI, Masjid Gedhe Kauman dan Gedung Societet Militer/Taman Budaya.

1. Kondisi Wilayah

Wilayah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta terletak pada ketinggian 113 meter diatas permukaan laut, dilintasi oleh Sungai Code, dengan luas wilayah 1,12 kilometer persegi yang berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Kemantren Ngampilan
- Sebelah Timur : Kemantren Pakualaman
- Sebelah Selatan : Kemantren Kraton
- Sebelah Utara : Kemantren Gedongtengen, Kemantren Danurejan

Gambar 1. Peta Kemantren Gondomanan

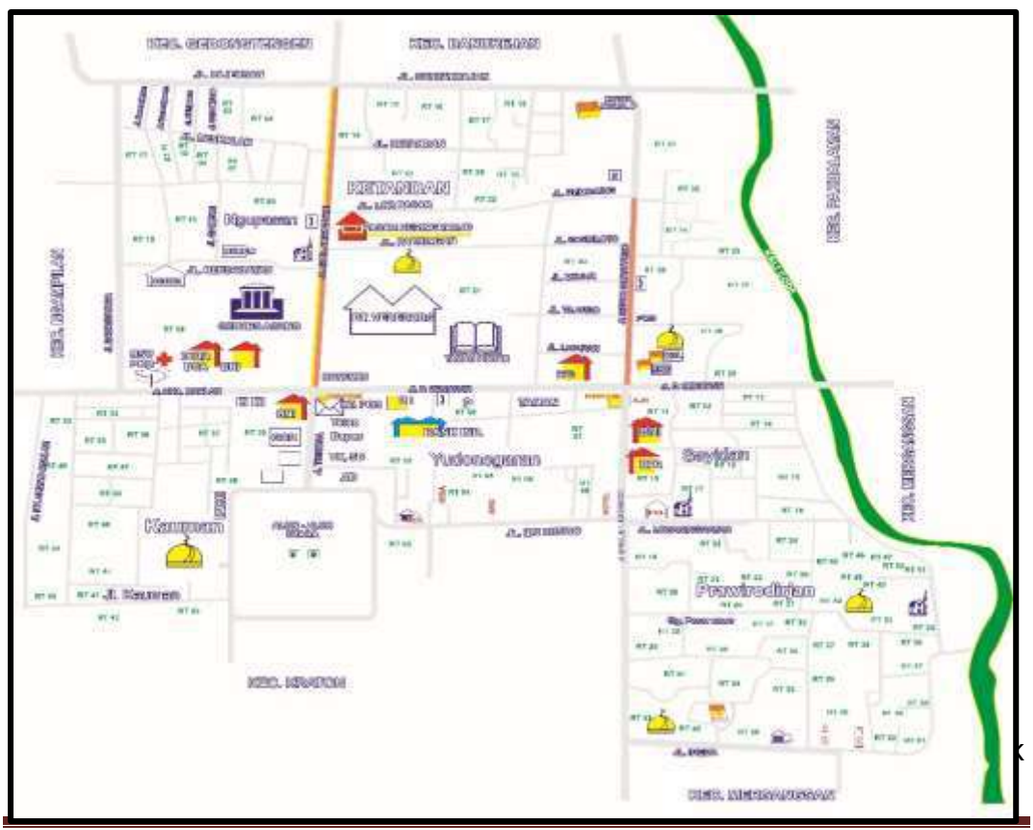

pariwisata, sebagian penduduk Kemantren Gondomanan bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Jumlah penduduk Kemantren Gondomanan pada akhir tahun 2023 sebanyak 14.481 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 6.994 jiwa dan perempuan 7.487 jiwa.

Tabel I.1

Jumlah Penduduk Kemantren Gondomanan Tahun 2023

Kelurahan	Luas km2	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
(1)	(2)	(3)	(4)
Prawirodirjan	0,45	8.989	19.975
Ngupasan	0,67	5.492	8.197
Jumlah	1,12	14.481	12.929

Sumber : Data Monografi Kemantren Gondomanan Tahun 2023)

Kemantren Gondomanan juga terbagi menjadi sejumlah kampung, RW dan RT di Kemantren Gondomanan sebagai berikut :

Tabel I.2

Jumlah RW dan RT Kemantren Gondomanan

Kelurahan	Jumlah Perangkat Kelurahan	Jumlah Kampung	Jumlah RW	Jumlah RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prawirodirjan	8	3	18	61
Ngupasan	8	4	13	49
Jumlah	16	7	31	110

Sumber : Data Monografi Kemantren Gondomanan Tahun 2023)

Selain lembaga-lembaga tersebut diatas juga terdapat kelembagaan masyarakat dan sosial lainnya baik di tingkat Kemantren maupun Kelurahan, diantaranya:

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Ngupasan dan Prawirodirjan.
b. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Ngupasan dan Prawirodirjan.

c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kemantren dan Kelurahan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan Dasawisma.
d. Ketua Kampung (ada 7 kampung yaitu : Ngupasan, Ketandan, Ratmakan, Kauman, Yudonegaran, Sayidan, Prawirodirjan).
e. Lembaga-lembaga kemasyarakatan baik di tingkat Kemantren maupun Kelurahan antara lain :
   - Karang Taruna Kemantren dan Kelurahan;
   - Kecamatan Sehat, Kelurahan Siaga;
   - Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM);
   - Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
   - Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS);
   - Paguyuban Kesenian;
   - Paguyuban Lansia;
   - Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD di tingkat Kemantren dan Kelurahan;
   - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
   - Kampung KB;
   - Kampung Ramah Anak, Kelurahan Ramah Anak; dan Kemantren Layak Anak;
   - Kampung Panca Tertib;
   - Kampung Wisata;
   - Kampung Tangguh Bencana (KTB);
   - Gapoktan dan Forum Gapoktan;
   - Kampung Proklim;
   - KONI Korman Gondomanan;
   - Forum Kemantren Inklusi Gondomanan;
   - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
   - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
   - Forum Bank Sampah Kemantren dan Kelurahan;
   - Jaga Warga; dan
   - Tim Pembina Jam Belajar Masyarakat (JBM).

2. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Susunan Organisasi Kemantren Gondomanan adalah terdiri dari :

a. Mantri Pamong Praja;

b. Sekretariat yang dipimpin oleh Mantri Anom terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Jawatan Praja;

d. Jawatan Keamanan;

e. Jawatan Kemakmuran;

f. Jawatan Sosial;

g. Jawatan Umum; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan

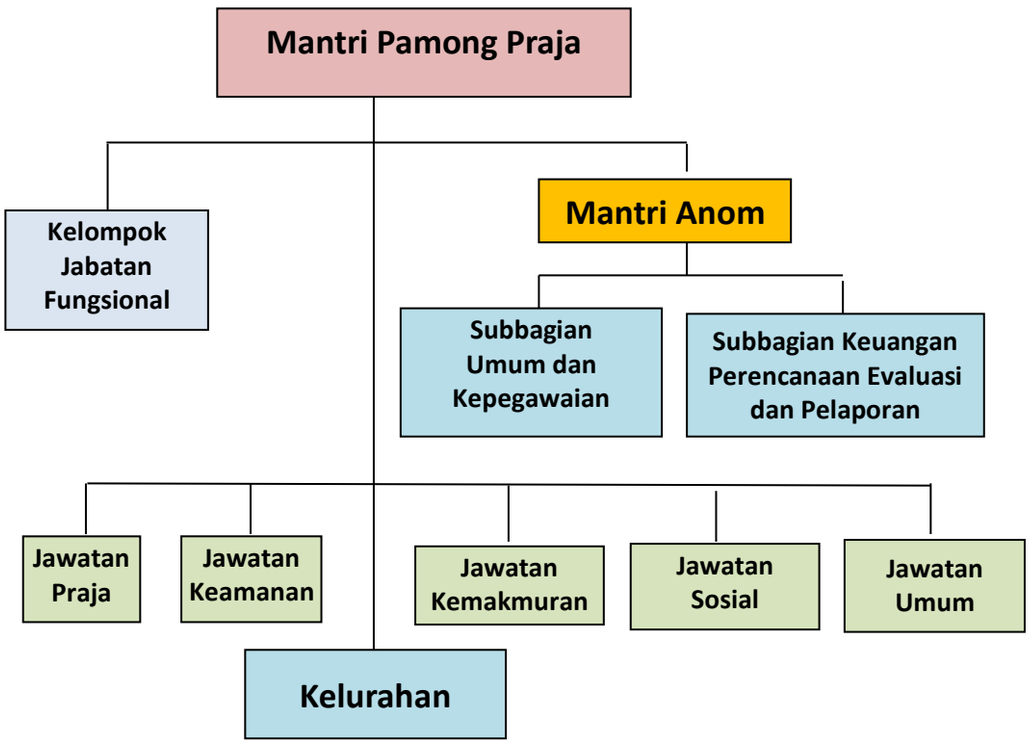

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan organisasi Kemantren di Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kecamatan/kemantren menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta pada Pasal 2 disebutkan bahwa :

a. Kemantren adalah sebutan Kemantren di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah Kota Yogyakarta,
b. Kemantren dipimpin oleh seorang Mantri Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kemantren mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing.

Sedangkan fungsi kemantren sebagaimana tersebut pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan

melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;

b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;

q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan,
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Selain melaksanakan fungsi tersebut diatas, kemantren di Kota Yogyakarta juga melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2023) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Walikota melimpahkan sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Mantri Pamong Praja meliputi 14 aspek yaitu :

1. Pemerintahan Umum;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial;
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Pertanahan;
9. Lingkungan Hidup;
10. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. Perhubungan;
13. Kebudayaan; dan
14. Perdagangan.

4. Isu-isu Strategis Organisasi

a. Pelayanan Publik

Kemantren merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga citra pelayanan publik yang diberikan oleh kemantren kepada masyarakat mencerminkan pula citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Oleh karena itu maka perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kemantren menjadi hal yang harus terus menerus dilakukan.

Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kemantren untuk mendukung tatakelola pemerintahan yang baik sejalan dengan apa yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur pula azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

1) kepentingan umum;
2) kepastian hukum;
3) kesamaan hak;
4) keseimbangan hak dan kewajiban;
5) profesionalisme;
6) partisipatif;
7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8) keterbukaan;
9) akuntabilitas;
10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11) ketepatan waktu; dan
12) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (PATEN), peran dan fungsi kemantren sebagai pusat pelayanan masyarakat makin diteguhkan dan pada tanggal 12 Desember 2012 PATEN di kemantren se Kota Yogyakarta diresmikan oleh Walikota

Yogyakarta. Hal itu menunjukkan tekad dan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kemantren dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dalam proses penyusunannya melibatkan unsur masyarakat melalui mekanisme Forum Konsultasi Publik (FKP).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 disebutkan bahwa kecamatan (kemantren) sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif Mantri Pamong Praja telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, yang mencakup pula kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan aparatur birokrasi di tingkat kemantren.

Kemantren merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kemantren Gondomanan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Kemantren Gondomanan juga telah melakukan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pembelian alat kantor, perbaikan gedung kantor kemantren dan kelurahan.

Untuk mengukur kinerja aparatur Kemantren Gondomanan dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat maka dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM). Pengukuran SKM dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran SKM merupakan indikator kinerja program dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kemantren Gondomanan.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Pengambilan kebijakan kemantren dimulai dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak dari tingkat kampung, tingkat kelurahan dan kemantren yang melibatkan representasi unsur-unsur dalam masyarakat. Perencanaan pada sisi ini merupakan hasil dari masukan masyarakat (*bottom up planning*)

melalui musyawarah pembangunan. Namun sejalan dengan pelimpahan kewenangan yang begitu dinamis maka beberapa aspek perencanaan juga bersifat *given* atau ditetapkan oleh pemerintah tingkat atasnya baik Pemerintah Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui dinas-dinas/instansi terkait. Sehingga proses perencanaan *bottom up planning* harus dipadukan dengan perencanaan yang bersifat *topdown*.

Pemberdayaan masyarakat pada tataran kemantren dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik yang menjadi kewenangan Mantri Pamong Praja dan Lurah sesuai dengan peraturan walikota tentang pelimpahan kewenangan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kemantren dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas kader masyarakat atau kelompok masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini direncanakan oleh masyarakat, sasaran, penerima manfaat dan pelaksananya juga dari masyarakat, hingga pengawasan monitoring dan evaluasi pun selalu melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Kinerja program pemberdayaan masyarakat diukur dari angka Swadaya murni masyarakat.yang dilaporkan oleh kelurahan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersifat kegiatan pembangunan fisik harus mengacu pada peraturan wallikota yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kemantren disamping kesesuaian dengan kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pembangunan wilayah berkorelasi dengan tingkat perkembangan pembangunan kelurahan/kemantren. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan.

Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan, dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

d. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan

pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus melibatkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kemantren Gondomanan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS* (*Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements*) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Meskipun demikian, sebagian informasi publik mungkin tidak dapat

diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka di setiap badan publik dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). Penunjukan PPID di Kota Yogyakarta ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk menilai kinerja PPID maka setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Daerah, yang menunjukkan seberapa informatif kah suatu badan publik.

f. Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2009,

Presiden RI menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melaksanakan reformasi gelombang kedua. reformasi birokrasi bermakna perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka ditetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 239 Tahun 2023 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 di Pemerintah Kota Yogyakarta dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 291 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023, yang menjadi pedoman arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi Reformasi Birokrasi General (8 area perubahan) dan Reformasi Birokrasi Tematik. Tingkatan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Makro berupa kebijakan penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; di tingkat Meso berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan penetapan perangkat daerah/unit kerja sebagai penanggung jawab/*leading sector* area perubahan tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta; dan di tingkat Mikro berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada perangkat daerah/unit kerja yang selaras dengan roadmap Pemerintah Kota Yogyakarta.

Salah satu catatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah bahwa penerapan reformasi birokrasi belum merata pada seluruh Perangkat Daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya pada Perangkat Daerah/unit kerja yang tidak terpilih dalam pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Untuk itu direkomendasikan agar memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mewajibkan seluruh Perangkat Daerah/unit kerja menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi melalui aplikasi PMPRB secara tepat waktu. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah/unit kerja dan mewajibkan seluruh Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan dan memotivasi pelaksanaan reformasi birokrasi maka nilai indeksi pelaksanaan RB ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama setiap perangkat daerah.

g. Dana Keistimewaan

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bergulir selama satu dasawarsa maka institusi kemantren/kelurahan selain mengalami sejumlah perubahan nomenklatur kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, juga mulai terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari anggaran dana keistimewaan. Keterlibatan kemantren/kelurahan dalam program/kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Tantangan yang dihadapi kemantren/kelurahan dalam situasi ini salah satunya adalah kurangnya personil baik secara kuantitas maupun kualitas (kompetensi) untuk menangani tugas tambahan terkait dana keistimewaan ini.

h. Darurat Sampah Akibat Penutupan TPA Piyungan

Keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang mencapai puncaknya pada awal tahun 2023 mengakibatkan terjadinya darurat sampah. Dengan adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tanggal 23 Juli sampai 5 September 2023 TPA Piyungan ditutup. Dengan penutupan TPA tersebut kabupaten/kota yang membuang sampahnya ke TPA Piyungan diharuskan mencari solusi untuk mengelola sampah masing-masing. Upaya yang dilakukan dimulai dari sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah sendiri, Gerakan Zero Sampah Anorganik, mengaktifkan dan memfasilitasi kegiatan bank sampah, dan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk mengurangi sampah di tingkat rumah tangga diantaranya :

a. Sosialisasi Mbah Dirjo (membuang sampah mandiri ala jogja) resik di tiap-tiap RW dengan membuat biopori untuk sampah organik, pengaktifan kembali bank sampah yang tidak aktif,
b. Pembuatan LOSIDA (Lodong Sisa Dapur).
c. Pelatihan pengelolaan sampah mandiri.
d. Pembuatan Ecoenzyme untuk sampah organik

Disamping upaya mereduksi dan mengolah sampah, sulitnya warga untuk membuang sampah mengakibatkan timbulnya tumpukan sampah liar di berbagai titik yang mengakibatkan polusi lingkungan dan merusak keindahan kota. Untuk mengatasinya maka dilakukan patroli terpadu Forkompimtren Gondomanan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta terhadap pembuangan sampah liar sekaligus penindakan terhadap warga yang tertangkap tangan melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

5. Keadaan Pegawai

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Kemantren Gondomanan sampai dengan akhir tahun 2023 terdiri atas PNS 28 orang, Naban 2 orang dan PTT 7 orang. Total jumlah pegawai (PNS dan Naban/TT) Kemantren Gondomanan adalah 37 orang, dari jumlah formasi sesuai hasil analisis jabatan sebanyak 50 orang, sehingga kebutuhan pegawai baru terpenuhi 74% atau tedapat kekurangan 13 orang. Seluruh jabatan struktural telah terisi, namun masih ada beberapa jabatan fungsional umum yang belum terpenuhi. Agar kinerja organisasi dapat terus berjalan optimal maka beberapa jabatan fungsional umum kemudian dipenuhi dengan cara *outsourcing* atau pengadaan kontrak kerja dengan penyedia jasa orang perseorangan (tenaga teknis) sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk data pegawai selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3
Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	Uraian	Laki-laki	Perem-puan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol IV	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mantri Pamong Praja	1	-	-	-	-	1	1
2.	Mantri Anom	-	1	-	-	-	1	1
3.	Kepala Jawatan	2	3	-	-	4	1	5
4.	Kasubbag	1	1	-	-	2	-	2
5.	JFU Kemantren	1	7	-	4	4	-	8
7.	Lurah	1	-	-	-	1	-	1
8.	Sekretaris Kel.	-	2	-	-	2	-	2
9.	Kasi Kelurahan	3	3	-	-	6	-	6
10.	JFU Kelurahan	-	1	1	-	-	-	1
11.	Naban	2	-	-	-	-	-	2
12.	Tenaga Teknis	5	2	-	-	-	-	7
	Jumlah	16	20	1	4	19	3	36

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Data Diklat Struktural/penjenjangan bagi pejabat struktural:

Tabel I.4
Jumlah pegawai berdasarkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Diklatpim III/PKA	2	1	1
2	Diklatpim IV/Adum/PKP	12	8	7
4	Pejabat Struktural yang belum mengikuti diklat penjenjangan	4	2	2

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.5
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	S2	3	1	2
2	S1	16	9	7
3	D III	4	-	4
4	SLTA	2	-	2
5	SLTP	1	1	-
6.	SD	1	-	1
	Jumlah	27	11	16

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut:

Tabel I.6

Jumlah pegawai berdasarkan eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	III A	1	1	-
2	III B	1	-	1
3	IV A	6	3	3
4	IV B	10	5	5
	Jumlah	18	9	9

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Dari tabel-tabel diatas dapat diketahui bahwa dari aspek kualitas, kompetensi yang dimiliki SDM pegawai Kemantren Gondomanan sudah cukup memadai, meskipun secara kuantitas masih belum mencukupi.

6. Keadaan Sarana Prasarana dan Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan keadaan sarana prasarana berupa barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kemantren Gondomanan sebagaimana terlampir pada tabel I.7 (Data Sarana dan Prasarana Kemantren Gondomanan tahun 2023).

Untuk melaksanakan semua kegiatan berbasis kinerja secara optimal, maka diperlukan dukungan anggaran yang terinci sesuai jenis penggunaannya. Dukungan anggaran bagi Kemantren Gondomanan sebagaimana terlampir pada tabel I.8 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kemantren Gondomanan Tahun 2023).

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2023 Kemantren Gondomanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp8.411.902.842,- dengan rincian belanja Pegawai sebesar Rp4.255.799.000,- dan belanja Non Pegawai sebesar Rp4.186.103.843,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja Non Pegawai yang berasal dari APBD sebesar Rp4.186.103.843,- yang didukung oleh 6 (enam) program dan 48 (empatpuluh delapan) subkegiatan.

D. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Penjelasan Umum Organisasi (Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Isu Strategis), Keadaan Sumber daya (keadaan pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan) dan Sistematika LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2023

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ sejenis;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender yang menyasar 5 kelompok rentan, yaitu: fakir miskin, disabilitas, anak, perempuan dan/atau lansia;
8. Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja;
9. Kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN 2023 :

Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan, Rencana Tindak Lanjut, dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan menuju *Good Governance* dalam rangka reformasi birokrasi yang berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan tetapi juga berorientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang digunakan untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kemantren Gondomanan untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, adalah dengan mendorong pengendalian serta evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, tahun 2023 Kemantren Gondomanan memiliki 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1) Tujuan : Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan;
   Sasaran : Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat.
2) Tujuan : Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan;
   Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara umum Kemantren Gondomanan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel III.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Target					Sumber data
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi 1:	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat							
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat per kembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	367	**368**	369	370	371	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan
Misi 2:	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat							
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	81(A)	81(A)	81(A)	81(A)	81(A)	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Sumber : Renstra Kemantren Gondomanan 2022-2026

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel VII-C Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel III.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	≥ 91	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Membandingkan antara target dengan capaian kinerja akan semakin menarik apabila disajikan pula prosentase dari capaian kinerja tersebut. Untuk mencari prosentase capaian kinerja per kegiatan digunakan rumus ***: (realisasi capaian kinerja : target) x 100***. Sedangkan untuk mencari prosentase kualitas dari realisasi capaian kinerja program digunakan rumus: ***(jumlah prosentase capaian kinerja kegiatan: jumlah kegiatan)***.

Tabel III.3

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan,2023

Nilai yang didapat kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Capaian kinerja organisasi Kemantren Gondomanan pada Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel III.4

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran/Tujuan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/Tujuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	368	368,3	100,082
Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Nilai Reformasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	A(81)	AA (90,83)	121,358

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis "***Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat"*** adalah **100,082%** dengan predikat peringkat kinerja **Sangat Tinggi.**

Upaya pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat, didukung dengan 5(lima) program yaitu :

1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan indikator kinerja terlaksananya Gelar Budaya Jogja;
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat meningkat;
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,. dengan indikator kinerja angka swadaya masyarakat meningkat;
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator kinerja jumlah pelanggaran Perda menurun, dan;
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator prosentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi.

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis "***Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat"*** adalah **121,358%** dengan predikat peringkat kinerja **Sangat Tinggi.**

Upaya pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat, didukung dengan 1(satu) program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Kemantren Gondomanan meningkat.

Selanjutnya capaian kinerja program Kemantren Gondomanan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel perbandingan target dan realisasi indikator program sebagai berikut:

Tabel III.5

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persen-tase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)
Sasaran 1 : Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan Meningkat					
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Gelar Budaya Jogja	1 kali	1 kali	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,62	88,68	100,068%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni Masyarakat	Rp 1.032.240.000	Rp 1.039.317.000	100,686%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda	140	136	102,86%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan Meningkat					
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Kemantren Gondomanan	80 (A)	86,47 (A)	100%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Rumus penghitungan nilai indikator capaian program-program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan, dengan indikator terlaksananya Gelar Budaya Jogja.

Program ini merupakan serangkaian kegiatan yang puncaknya adalah Living Museum, pentas seni, kirab budaya dan gelar potensi UMKM dalam rangka peringatan Hari Keistimewaan Yogyakarta yang jatuh

pada tanggal 31 Agustus 2023. Target kegiatan ini dinyatakan dalam angka 1(satu) kali dan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar sehingga prosentase capaian kinerja yang diperoleh adalah **100%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, dihitung menggunakan rumus perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta. Formulanya adalah :

Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25.

Berdasarkan capaian kinerja program di Tahun Anggaran 2022 pada tabel di atas maka prosentase capaian kinerja terhadap indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari target 88,62 tercapai **88,68** prosentase capaian **100,068%** dengan kategori predikat kinerja **Sangat Tinggi.**

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Angka Swadaya Masyarakat, diperoleh dari jumlah angka swadaya murni masyarakat di Kelurahan se Kemantren Gondomanan selama setahun.

Sumber data angka swadaya masyarakat adalah laporan nilai swadaya masyarakat kelurahan, yaitu jumlah angka nominal kegiatan yang dibiayai secara swadaya oleh masyarakat. Data nilai swadaya masyarakat kelurahan se Kemantren Gondomanan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.6

Data Nilai Swadaya Murni Masyarakat Tahun 2023

NO	Kelurahan	Nilai swadaya murni tahun 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Ngupasan	468.430.000
2.	Prawirodirjan	570.887.000
	Total swadaya murni	1.039.317.000
	Target swadaya murni	1.032.240.000
	Persentase capaian	100,686 %

Sumber : Laporan Swadaya Murni Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan, 2023.

Berdasarkan data capaian kinerja program di Tahun Anggaran 2023 pada tabel diatas maka untuk indikator swadaya masyarakat tercapai Rp1.039.317.000,- dari target Rp1.932,240.000,- sehingga prosentase capaian kinerjanya **100,686%** dengan kategori predikat kinerja **Sangat Tinggi**.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator penurunan jumlah pelanggaran Perda, dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaran Perda dengan target yang ditetapkan berdasarkan trend jumlah pelanggaran selama 3 (tiga) tahun terakhir. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Target} - (\textbf{realisasi} - \textbf{target})}{\textbf{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data laporan Jawatan Keamanan diketahui bahwa jumlah pelanggaran Perda yang terjadi di wilayah Kemantren Gondomanan sepanjang tahun 2023 tercatat 136 kali dari target yang ditetapkan 140 kali, atau terjadi penurunan 2,14%. Dari formula diatas maka dapat diketahui prosentase capaian kinerja program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tahun Anggaran 2023 untuk adalah **102,86%** dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator prosentase permasalahan di bidang pemerintahan umum yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi, dihitung dengan

membandingkan jumlah permasalahan yang ada dengan jumlah permasalahan yang terselesaikan. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah permasalahan yang ada}}{\textbf{Jumlah permasalahan yang terselesaikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data laporan Jawatan Praja diketahui bahwa semua permasalahan di bidang pemerintahan umum selama tahun 2023 telah dapat diselesaikan sehingga prosentase capaian kinerja program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tahun Anggaran 2023 untuk adalah **100%** dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemantren Gondomanan.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah merupakan hasil evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) tingkat Kota Yogyakarta terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 beserta kelengkapan bukti dukung yang dibutuhkan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Inspektorat Kota Yogyakarta dengan nomor : X.713/81/E.AKIP/B/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023, nilai AKIP yang diperoleh Kemantren Gondomanan untuk tahun 2022 adalah sebesar **86,47** atau berada pada predikat **A (Sangat Baik**).

Dari target nilai **80(A)** maka prosentase capaian yang diperoleh adalah **100%** atau termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Dalam upaya merealisasikan program-program tersebut diatas secara efektif dan efisien maka perlu didukung aspek keuangan. Pada tabel dibawah ini ditunjukkan perbandingan target dan realisasi capaian kinerja keuangan program Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel III.7

Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi

Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000	100.000.000	100 %
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33.645.650	33.645.650	100 %
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 700 846 748	2 672 909 448	98,97 %
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	185.123.000	185.123.000	100%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.975.000	58.975.000	100%
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.333.312.445	5.092.139.296	95,48 %
	Jumlah/rata-rata	**8.411.902.843**	**8.142.792.394**	**96,80 %**

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian target kinerja keuangan semua program berada diatas 91% atau masuk kategori capaian **Sangat Tinggi**. Bahkan untuk program kerja yang menjadi substansi dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai realisasi rata-rata 99,06%. Kondisi ini secara umum menunjukkan bahwa Kemantren Gondomanan telah menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan yang baik dan mampu melaksanakan semua rencana secara efektif dan efisien serta mencapai target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.8

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkem-bangan pemba-ngunan Keman-tren Gondoma-nan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	367	368	367, 36	368,3	100, 1	100,082
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Nilai reformasi birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	81(A)	81(A)	86,47 (A)	90,83 (AA)	106,75	121,358

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis "***Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat***" tahun 2023 mengalami penurunan 0.06 point dari capaian tahun sebelumnya, namun prosentase capaian kinerjanya sama. Hal ini menunjukkan bahwa tetap ada dinamika dan peningkatan dalam komponen-komponen parameter yang menyusun indikator nilai tingkat perkembangan pembangunan kelurahan/kemantren meskipun dalam skala yang kecil karena dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2022-2023, diantaranya dampak pandemi Covid19 yang mulai melandai pada periode tersebut.

Dari data hasil penilaian tingkat perkembangan pembangunan di level kelurahan maka diketahui bahwa Kelurahan Prawirodirjan mendapatkan nilai sedikit lebih tinggi (368,6) daripada Kelurahan Ngupasan (368). Hal ini disebabkan perkembangan infrastruktur sarana prasarana dan dinamika kegiatan sosial ekonomi masyarakat di kelurahan Prawirodirjan pada tahun 2023 yang dinilai relatif lebih cepat, terutama

dengan adanya inovasi pengembangan kawasan Lembah Code di RW 17 dan RW 18 Prawirodirjan (KOMPAK CODE/Kolaborasi Pengembangan Kawasan Lembah Code). Kegiatan yang berupa pembangunan sarana prasarana fisik dan fasilitas publik di bantaran sungai Code ini merupakan bentuk sinergitas pengembangan kawasan dengan Dinas PUPKP Kota Yogyakarta dan Kelurahan Prawirodirjan yang sudah tertuang dalam dokumen *masterplan* Perencanaan Strategis Kelurahan Prawirodirjan, yang bertujuan untuk mengubah kawasan kumuh menjadi layak huni dan membangun sarana prasarana pendukung untuk kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat setempat.

Capaian kinerja sasaran strategis "***Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat***" tahun 2023 mengalami peningkatan 4.36 point dari capaian tahun sebelumnya, demikian pula prosentase capaian kinerjanya meningkat 14,6%. Hal ini menunjukkan proses internalisasi, pelaksanaan dan pendokumentasian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kemantren Gondomanan yang semakin baik. Selain itu, tindak lanjuti terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai hasil pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2023.

Capaian kinerja sasaran strategis yang sangat tinggi tenty tidak dapat dilepaskan dari capaian kinerja program-program yang mendukungnya. Pada tabel berikut memperlihatkan perbandingan capaian target kinerja masing-masing program pada tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.9

Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023
dengan Tahun-tahun Sebelumnya

No	Program	Indikator	Target Tahun				Capaian dan Prosentase Realisasi Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaab	Gelar Budaya Jogja	-	-	-	1 kali	-	-	-	1 kali (100%)
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87,7	87,9	87,9	88,62	87,7 (100%)	88,57 (101%)	88,62 (100,06%)	88,68 (100,068%)
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	460.000 .000	469.200 .000	478.584 .000	1.032.240. 000	759.386 .500 (165,08 %)	480.256 .250 (102%)	515.392. 000 (107,69%)	1.039.317. 000 (100,686%)
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggar-an Perda	-	160	157	140	-	145 (109,38 %)	152 (103,18%)	136 (102,86%)
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase penyelesai an masalah pemerintah an umum	-	-	-	100%	-	-	-	100% (100%)
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	-	-	80(A)	80 (A)	-	-	87,19 (A) (100%)	86,47 (A) (100%)

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Sedangkan persentase perbandingan capaian kinerja keuangan masing-masing program Kemantren Gondomanan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel III.10

Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Program/Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja (%)			
		2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(6)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	-	-	-	100 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	94,60	99,12	99,65	100 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	98,95	98,02	99,19	98,97 %
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	99,94	100	100%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98,95	98,02	99,19	100%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,29	94,87	92,83	95,48 %
					96,80 %

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Gambar 3

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

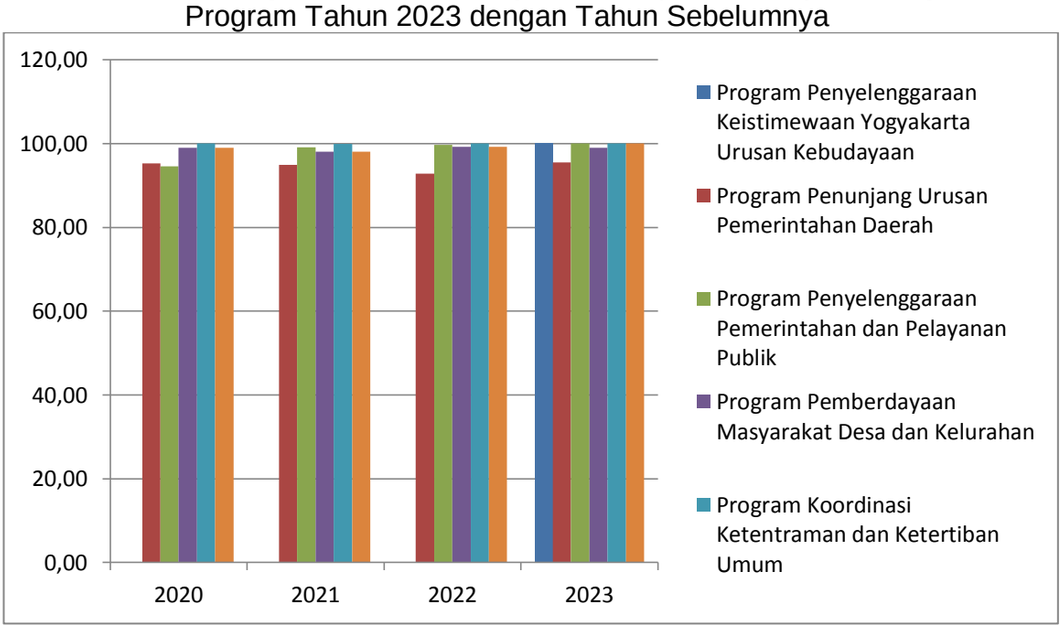

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam menilai pencapaian tujuan jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra maka perlu dievaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun apakah sudah selaras dengan target tujuan tersebut.

Tabel III.11

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir Renstra

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/ Tujuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 ter hadap target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	368	368,3	371	99,27%
Meningkatkan Nilai reformasi birokrasi Kemantren Gondomanan	Nilai reformasi birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai reformasi birokrasi Kemantren Gondomanan	81(A)	90,83 (AA)	81(A)	121,358%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Dari data tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja utama semakin mendekati target akhir Renstra, sehingga dapat diharapkan target akhir Renstra akan dapat dicapai dengan baik tanpa kendala yang berarti.

Selanjutnya capaian indikator kinerja program terhadap target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.12

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Prosentase capaian tahun ini terhadap target akhir Renstra
(1)	(2)		(6)	(7)	(8)	(6)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Gelar Budaya Jogja	1 kali	1 kali	1 kali	100%
2	Program Penyelengga-raan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,62	88,68	88,75	99,92%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	1.032.240.000	1.039.317.000	1.072.776.000	98,88%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	140	136	110	124,5%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase penyelesaian masalah sbg hasil koordinasi	100%	100%	100%	100%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi/SAKIP	80(A)	86,47(A)	80(A)	100%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis dan semua program di Kemantren Gondomanan masuk kategori Sangat Tinggi dengan prosentase capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Tentu hal ini tidak terlepas dari peran faktor-faktor yang mendukung kinerja Kemantren Gondomanan tersebut. Meskipun masih ada beberapa faktor penghambat, namun berkat sinergi yang kuat antara Pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* serta motivasi dan semangat untuk melayani dengan hati, maka hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi dan diminimalisir.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Organisasi Sejenis

Sebagai bagian dari upaya perbaikan yang terus menerus maka perlu dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan capaian instansi/ organisasi sejenis. Kemantren Gondomanan telah melakukan perbandingan capaian kinerja dengan capaian instansi/organisasi sejenis dengan cara melihat data capaian kinerja di data LKIP pada website beberapa Kemantren lain sebagaimana terlihat pada matriks berikut :

Tabel III.13

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Instansi/ Organisasi Sejenis

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Kemantren Tahun 2022 (Target/Realisasi)				Keterangan
		Gondomanan	Ngampilan	Pakualaman	Gedongtengen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren	367 / 367,36	389 / 396,5	384.5 / 399	366,5 / 366,5	
2	Nilai Reformasi Birokrasi	/87,18	87,02	89,64	87,54	
3	Nilai Hasil Survei SKM	88,57 /88,62	84,21 / 84,21	81,69 / 81,72	84 / 84,76	
4	Penurunan Angka Pelanggaran Perda	157 / 152	70 / 69	84 / 82	123 / 123	
5	Angka Swadaya Murni	478.584.000/ 515.392.000	722.994.000 / 763.481.000	635.697.000/ 891.703.300	791.346.000 / 1.348.166.000	

Sumber : Analisis Data LKIP 2022 di Website Kemantren Gondomanan, Ngampilan, Pakualaman dan Gedongtengen.

Dari data perbandingan tersebut diatas maka diketahui bahwa penetapan target dari masing-masing Kemantren nilai baseline nya berbeda-beda, namun rata-rata realisasinya tercapai 100% atau lebih.

5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kemantren Gondomanan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat

Sasaran strategis tahun 2023 "***Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat"*** telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, dan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maka optimis target akhir Renstra di tahun keempat akan dapat dicapai. Selain itu, capaian target pada program-program yang mendukung sasaran strategis juga telah tercapai sesuai target yang ditetapkan bahkan melebihi target. Hal ini juga menunjukkan trend positif pencapaian kinerja program di tahun-tahun mendatang.

Penjelasan capaian kinerja pada masing-masing indikator program adalah sebagai berikut :

(1) Gelar Budaya Jogja

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan merupakan program baru yang dilaksanakan di 14 Kemantren di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebagai respon terhadap alokasi Dana Keistimewaan yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk setiap kemantren. Gelar budaya Jogja sebagai puncak peringatan Hari Keistimewaan Yogyakarta yang jatuh pada tanggal 31 Agustus diisi dengan beberapa kegiatan yaitu :

- Living Museum di Gedung ex Telkom Jalan Pangurakan;
- Pawai Budaya dari 7 (tujuh) kampung;
- Pentas Seni dari 7 (tujuh) kampung; dan
- Gelar potensi UMKM Gondomanan.

Seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar dengan dukungan seluruh stakeholder dan elemen masyarakat yang terrepresentasi pada 7 (tujuh) kampung.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini juga menorehkan prestasi Kemantren Gondomanan sebagai Juara III Lomba Living Museum Tingkat Kota Yogyakarta.

(2) Nilai survei kepuasan masyarakat,

Data akhir kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dari setiap unit pelayanan dengan data kuesioner berjumlah 150 responden. Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan

masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11. Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.14 Nilai Unsur Pelayanan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	3,473
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,593
3	Waktu Penyelesaian	3,560
4	Informasi Pelayanan *)	3,567
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,547
6	Kompetensi Pelaksana **)	3,613
7	Perilaku pelaksana **)	3,707
8	Maklumat Pelayanan	3,593
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,593

Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan, 2023

Untuk mengetahui nilai survey unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut : (3,473x 0,11) + (3,593x 0,11) + (3,560x 0,11) + (3,567 x 0,11) + (3,547x 0,11) + (3,613x 0,11) + (3,707x 0,11) + (3,593x 0,11) + (3,593x 0,11) = 3,547. Jadi Nilai survei adalah **3.547**. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar = 3,547x25 =**88,68**
- Mutu pelayanan **A (Sangat Baik)**.
- Kinerja unit pelayanan **Sangat Memuaskan**.

Dari data tersebut maka dapat diketahui bahwa dari target 88,62

tercapai 88,68 atau prosentase capaian 100,068%.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tinggi harus dipertahankan. Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval SKM 3,5324 - 4,00 atau Sangat Memuaskan.

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023 ditemukan adanya aspek pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu : aspek Perilaku pelaksana dengan nilai 3,707. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat puas dengan sikap dan perilaku petugas pelayanan di Kemantren Gondomanan. Terhadap aspek ini maka perlu untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan perilaku pelaksana pelayanan yang positif dan produktif dengan cara :

a. selalu mengingatkan kepada petugas pelaksana pelayanan untuk berperilaku yang baik dan responsif dalam melayani;
b. mengikutsertakan petugas pelaksana pelayanan pada diklat-diklat pengembangan kompetensi teknis pelayanan; dan
c. memberikan reward bagi petugas pelayanan yang berprestasi.

Adapun unsur pelayanan dengan nilai terendah pada aspek Persyaratan (dengan nilai 3.473) dan aspek Produk spesifikasi jenis pelayanan (dengan nilai 3.547). Terhadap kedua aspek ini maka perlu dianalisis penyebab dan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Upaya untuk meningkatkan nilai pada aspek tersebut antara lain sebagai berikut :

a. membuat E-Katalog pada layanan *WhatsApp* Kemantren Gondomanan sehingga masyarakat dapat melihat persyaratan pelayanan pada katalog tersebut, menampilkan pada website Kemantren, dan warga dapat langsung melihat tanpa harus datang langsung ke Kemantren.
b. mengarahkan pemohon layanan administrasi kependudukan untuk mengajukan permohonan secara online menggunakan JSS (Jogja Smart Services); dan

c. untuk aspek Produk spesifikasi jenis pelayanan, memberikan informasi melalui e-katalog WA Kemantren, bahwa produk pelayanan di Kemantren sesuai Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Secara Elektronik.

Selain mengupayakan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut diatas, guna mendapatkan feedback yang lebih cepat dari pengguna layanan dan respon tinggi terhadap adanya aspek layanan yang perlu dibenahi atau diperbaiki maka dilakukan *cut off* survei kepuasan layanan pada pertengahan tahun (akhir Juni 2023). Dengan demikian maka diharapkan jika ditemukan permasalahan layanan akan cepat ditangani tanpa harus menunggu hasil akhir survei.

(3) Angka swadaya masyarakat, dari target Rp 1.032.240.000,- tercapai sebesar Rp 1.039.317.000,- atau prosentase capaian 100,686% dari target yang ditetapkan.

Dari pencermatan laporan diperoleh data bahwa angka swadaya murni di Kelurahan Ngupasan tercapai sebesar Rp468.430.000,- dan di Kelurahan Prawirodirjan tercatat Rp570.887.000,-.

Secara umum terdapat peningkatan angka target dan capaian swadaya masyarakat dari tahun sebelumnya (target 2022 Rp478.584.000 tercapai Rp515.292.000,-) namun prosentase capaian menurun dari tahun sebelumnya (tahun 2022 prosentase capaian 107,67%). Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan sosial masyarakat (pertemuan/rapat rutin RT, RW, PKK, Dasawisma) yang pada masa pandemi harus dikurangi atau ditiadakan untuk sementara, sehubungan dengan situasi pandemi yang mulai melandai maka kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan berangsur-angsur normal kembali. Selain itu makin tingginya angka swadaya masyarakat juga terdorong dengan adanya Gelar Budaya Jogja yang didukung oleh seluruh warga masyarakat melalui RW/Kampung dalam bentuk keterlibatan pada pawai budaya, pentas seni, Living Museum dan gelar potensi UMKM.

(4) Jumlah pelanggaran Perda

Jumlah pelanggaran Perda mengalami penurunan dari target yang ditetapkan karena kegiatan penegakan Perda sudah tidak lagi diintensifkan simultan dengan kegiatan penegakan protokol kesehatan pencegah penyebaran Covid-19. Persentase pelanggaran terbanyak adalah pedagang kakilima (PKL) yang tumbuh menjamur terutama pada musim liburan. Temuan pelanggaran PKL antara lain berjualan di lokasi yang tidak diijinkan untuk berjualan (kawasan pedestrian), tidak menjaga kebersihan, dan tidak menaati protokol kesehatan. Selain itu ada juga pemasangan reklame/poster/banner yang tidak pada tempatnya, dan pelanggaran IMB.

Upaya penegakan Perda yang dilakukan antara lain : merelokasi PKL yang berjualan di kawasan pedestrian Jalan KHA Dahlan, penertiban PKL, dan patroli terpadu bersinergi dengan Forkompim Kemantren Gondomanan (Polsek, Koramil, Puskesmas, BKO, Satuan Linmas, dan Forum Komunitas Alun-alun Utara).

Potensi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum lainnya yang muncul di tahun 2023 adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024 yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, pemasangan APK di titik-titik tertentu yang berdekatan oleh beberapa kontestan peserta Pemilu juga menimbulkan potensi konflik horisontal antar pendukung calon legislatif/partai politik tertentu. Terhadap pelanggaran pemasangan APK sampai dengan akhir tahun 2023 baru sebatas didata dan dilaporkan, karena tindakan pencopotan baru dapat dilakukan apabila sudah mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta.

(5) Prosentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Indikator prosentase permasalahan di bidang pemerintahan umum yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi dihitung dengan membandingkan jumlah permasalahan yang ada dengan jumlah permasalahan yang terselesaikan. Dari laporan Jawatan Praja diketahui bahwa semua permasalahan di bidang pemerintahan

umum selama tahun 2023 telah dapat diselesaikan sehingga prosentase capaian kinerja program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tahun Anggaran 2023 untuk adalah **100%** dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**. Berdasarkan catatan notulensi rapat koordinasi Forkompimtren Gondomanan, permasalahan yang ditangani melalui koordinasi antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel III.15

Permasalahan yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Forkompimtren Gondomanan tahun 2023

No	Permasalahan	Stakeholder yang Terlibat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemasangan APK di Jembatan Surokarsan	- Forkompimtren Gondomanan & Mergangsan - Panwascam Gondomanan & Mergangsan - Ka Jawatan Praja dan Ka Jawatan Keamanan - BKO Satpol PP	Lokus kejadian di perbatasan dan pelaku yang terlibat insiden dari Gondomanan & Mergangsan.
2.	Pelaksanaan Pemilu Damai dan Rencana pengamanan Logistik Pemilu 2024	- Forkompimtren Gondomanan - PPK dan PPS se Gondomanan - Panwascam Gondomanan - Ka Jawatan Praja dan Ka Jawatan Keamanan - BKO Satpol PP	Rapat koordinasi dan keterlibatan dalam kampanye/sosialisasi Pemilu Damai
3.	Penanganan dan pencegahan stunting	- Forkompimtren Gondomanan Petugas PLKB - Lurah Ngupasan dan Prawirodirjan	Rapat koordinasi dan ekspose peran masing-masing dalam lokakarya stunting
4.	Pengamanan hari-hari besar (Lebaran, Idul Adha dan Nataru)	- Forkompimtren Gondomanan - Ka Jawatan Keamanan - BKO Satpol PP	Rapat koordinasi dan keterlibatan dalam pengamanan

Sumber : Laporan Jawatan Praja Kemantren Gondomanan Tahun 2023

b. Sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat

Sasaran strategis tahun 2023 "***Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat"*** telah tercapai sesuai target

yang ditetapkan, dan berdasarkan capaian pada tahun sebelumnya maka optimis target akhir Renstra di tahun keempat akan dapat dicapai. Selain itu, capaian program yang mendukung sasaran strategis ini juga telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan trend positif pencapaian kinerja program di tahun-tahun mendatang. Penjelasan capaian kinerja pada indikator program yang mendukung sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Program : Nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 oleh Inspektorat,

Target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah 80(A) dan tercapai 86,47(A) atau prosentase capaian 108,99% jika didasarkan pada nilai yang diperoleh, atau 100% jika basis capaian adalah predikat (A atau Memuaskan). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Korta Yogyakarta pada Kemantren Gondomanan Tahun 2022, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta adalah sebesar 86,47 dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang "memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan Kinerja, dengan bobot sebesar 30% dengan nilai 29,53. Seluruh dokumen perencanaan telah tersedia dengan lengkap, memenuhi standar yang baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
b) Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30% dengan nilai 29,36. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yaitu terdapat kegiatan dan sub kegiatan pada TW II yang belum mencapai target TW II.
c) Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15% dengan nilai 13,39. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yaitu pendokumentasi proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja berkala sebagai bentuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja belum optimal

(dokumentasi tindak lanjut dalam Berita Acara Desk Timbal Balik belum lengkap).

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 25% dengan nilai 14,19. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yaitu, evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, namun setiap komponen akuntabilitas kinerja masih dievaluasi secara terpisah dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi maka Tim Penilai Inspektorat Kota Yogyakarta selanjutnya merekomendasikan sebagai berikut :

a) Meningkatkan dokumentasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dalam Berita Acara Desk Timbal Balik.
b) Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai target tiap triwulan pada tahun berjalan.
c) Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terhadap beberapa rekomendasi tersebut maka Kemantren Gondomanan telah menindaklanjuti sebagaimana mestinya, yang akan diuraikan di bagian akhir Bab ini.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dari hasil analisis laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kemantren Gondomanan tahun 2023 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat dinyatakan bahwa Kemantren Gondomanan telah berhasil mencapai target dan tujuan organisasi. Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1) Faktor internal

(a) Ketersediaan anggaran yang semakin memadai

Program kerja yang direncanakan dapat terlaksana karena terencana dengan baik termasuk kebutuhan anggarannya. Pembiayaan dan anggaran sudah sesuai pula dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

(b) Kualitas dan kompetensi SDM yang makin meningkat

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) perangkat daerah Kemantren Gondomanan memang dapat menjadi kendala bagi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja. Namun keterbatasan kuantitas jika didukung dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ternyata mampu menjadi kekuatan potensial dan menghasilkan kinerja optimal. Melalui proses motivasi pembelajaran yang terus menerus maka Kemantren Gondomanan berhasil mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk merealisasikan program kegiatan yang direncanakan dan mencapai target yang ditetapkan.

(c) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan kinerja dalam pencapaian target yang ditetapkan. Sedangkan monitoring dan evaluasi merupakan alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan solusi yang tepat.

Guna mengefektifkan masa tahun anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan maka perencanaan yang telah disusun dalam bentuk RKA dan DPA SKPD Kemantren Gondomanan kemudian lebih didetailkan lagi. Tatakala kegiatan disusun sampai dengan level hari/tanggal pelaksanaan kegiatan dan target harian, sehingga semakin mempermudah dalam operasionalisasinya. Selain itu, secara simultan juga dilakukan monitoring dan evaluasi sesering mungkin sehingga meminimalisir celah terjadinya kesalahan, keterlambatan, atau penyimpangan. Apabila ditemui permasalahan dan hambatan pun dapat segera teridentifikasi dan dicarikan solusinya, agar tidak mengganggu upaya pencapaian target dan tujuan.

Dalam rangka penguatan sistem monitoring dan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan serta responsivitas gender di semua program/kegiatan, maka setiap Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) diharuskan menyusun kerangka acuan kerja (KAK), menyusun *Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement* (GAP/GBS) dan melakukan analisis resiko dalam bentuk dokumen Manajemen Risiko (MR). Selain itu, pada akhir tahun anggaran setiap PPTK diwajibkan menyusun laporan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) pegawai yang bersangkutan.

(d) Inovasi Sistem dan Prosedur Pelayanan

Dalam upaya mengakselerasi pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian tujuan maka suatu institusi harus terus berupaya mencari celah-celah inovasi yang bisa dilakukan. Selain adanya dorongan dari Pemerintah Kota untuk terus mengembangkan inovasi, inspirasi perubahan demi efisiensi dan terbaik melayani juga harus ditumbuhkan dalam diri setiap individu dalam organisasi.

Beberapa inovasi dan penyederhanaan sistem prosedur pelayanan di Kemantren Gondomanan tahun 2023 antara lain :

- <u>Penyempurnaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan)</u>
  Paket Komanan yang dilaunching pada bulan September 2019 dan mendapat sambutan positif, dukungan dan apresiasi dari segenap warga masyarakat serta pihak-pihak terkait, disempurnakan dengan mengevaluasi dan menyesuaikan SOP paket layanan dengan perubahan regulasi di tingkat yang lebih tinggi, situasi pasca pandemi, dan perkembangan teknologi informasi terkini.

- <u>Sosialisasi SOP pelayanan secara virtual</u>
  Untuk merespon keingintahuan masyarakat terhadap informasi prosedur baru pelayanan di masa pandemi, maka dilakukan sosialisasi secara virtual, mengingat kondisi pandemi tidak

memungkinkan untuk mengumpulkan warga guna diberikan informasi pelayanan secara langsung. Sosialisasi dilakukan dengan membuat video pendek berdurasi 3-5 menit berisi tentang SOP dan tatacara mengakses layanan. Video kemudian disebarluaskan dengan diunggah ke website dan media sosial Kemantren Gondomanan, serta dishare ke grup-grup *whatsapp* RT/RW dan warga.

- Pendampingan pelayanan

  Terhadap warga yang masih belum memahami prosedur pelayanan secara online, atau bagi warga yang memiliki keterbatasan dan kurang memahami penggunaan gadget maka dalam mengakses pelayanan bisa didampingi oleh petugas.

(e) Pemanfaatan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat dirasakan sangat membantu dalam mengakselerasi pencapaian target program dan kegiatan. Melalui aplikasi *Jogja Smart Services (JSS)* yang memuat ratusan macam SIM sangat memudahkan bagi warga masyarakat dan perangkat Kemantren Gondomanan dalam mengakses informasi, memberikan layanan, mengolah data, melakukan monitoring dan evaluasi, menyusun laporan, hingga menyampaikan publikasi sebagai wujud akuntabilitas. Selain itu pemanfaatan berbagai platform media sosial juga mendukung penyebarluasan informasi dan percepatan koordinasi.

(f) Penerapan *system reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai

Dalam rangka mendorong motivasi berkinerja dan semangat berprestasi maka dipandang perlu untuk menerapkan *system reward and punishment*. Bentuknya adalah pemberian reward berupa piagam penghargaan dan hadiah dari pimpinan organisasi (Mantri Pamong Praja) bagi pegawai yang dapat mencapai kinerja yang tinggi, dan hukuman/sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku jika pegawai tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan atau jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

2) Faktor Eksternal

(a) Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kemantren Gondomanan mulai dari tingkat terendah (RT, RW, kampung, kelurahan, kemantren) secara aktif dilibatkan dan berperan penting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Keterlibatan aktif dan intensif dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ini memberikan dampak positif berupa makin meningkatnya ketepatan perencanaan, ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi dan kualitas kegiatan.

(b) Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

Beberapa program yang terkait langsung dengan masyarakat, khususnya program pemberdayaan masyarakat, tentu harus didukung dengan partisipasi masyarakat itu sendiri, baik sebagai subyek maupun sasaran penerima manfaat kegiatan. Bahkan indikator nilai tingkat swadaya masyarakat ini menjadi cerminan tinggi rendahnya tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini bisa diwujudkan dalam beragam bentuk mulai dari kesediaan untuk merubah pola pikir dan budaya yang kurang produktif, peningkatan ketrampilan yang berkontribusi positif terhadap perekonomian, swadaya masyarakat dalam kegiatan dan pembangunan sarana prasarana umum, dan lain sebagainya.

Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan secara lebih inklusif dibangun melalui Musrenbang Tematik, dimana tahapan Musrenbang di tingkat kemantren diformat secara horisontal dengan membentuk 3 (tiga) klaster, yaitu klaster pembangunan prasarana fisik, klaster kesehatan, perempuan dan anak, dan klaster ekonomi sosial budaya. Melalui sistem klasterisasi tersebut diharapkan pembahasan dan penyusunan rencana jangka pendek menengah dan panjang dari masing-masing klaster dapat lebih fokus, intensif, holistik dan integratif.

7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Jika dirinci secara detail tidak seluruh kegiatan dapat dikatakan

berhasil walaupun capaian kinerja secara keseluruhan masuk kategori Sangat Tinggi. Meskipun demikian deviasi anggaran yang tergolong kecil ini tidak berpengaruh signifikan pada rata-rata umum capaian kinerja.

a. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Tercapainya target indikator kinerja program yakni terlaksananya Gelar Budaya Jogja secara kuantitatif maupun kualitatif berdampak pada peningkatan nilai swadaya masyarakat yang berupa dukungan keterlibatan Kampung dalam perhelatan peringatan Hari keistimewaan Yogyakarta. Secara implisit program/kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengangkat dan memperkuat posisi kampung sebagai institusi peninggalan sistem pemerintahan khas Yogyakarta di masa lalu yang coba difungsikan kembali di masa kini dengan memanfaatkan dana keistimewaan.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian target kinerja program, yakni nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP ditunjang oleh beberapa upaya antara lain :

a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara rutin dan intensif;
b) Tertib dalam pencatatan dan pendokumentasian kegiatan dan bukti dukung.
c) Penyampaian laporan dan administrasi kegiatan secara lengkap dan tepat waktu.
d) Respon dan tindak lanjut cepat dan tepat terhadap rekomendasi hasil evaluasi dan/atau permasalahan yang terjadi.

3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a) Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pernyataan kinerja karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan

pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban. Kegiatan pelayanan dengan Paket Komanan terus dikembangkan disesuaikan dengan perubahanregulasi pelayanan dan perkembangan teknologi terkini sehingga masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.

b) Gencarnya sosialisasi dan publikasi pelayanan di kecamatan yang dilakukan melalui berbagai media sosial seperti *website, facebook, instagram, youtube* dan bulettin Gondoarum menjadikan masyarakat makin memahami dan mendorong untuk makin aktif mengakses berbagai pelayanan dan informasi yang diberikan oleh Kemantren Gondomanan.

c) Dukungan teknologi informasi berupa aplikasi JSS juga semakin memudahkan sistem prosedur dan konektivitas interface pelayanan Kemantren Gondomanan dengan masyarakat.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a) Kegiatan pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan di kemantren maupun kelurahan telah melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaannya.

b) Partisipasi, dukungan, keterlibatan dan swadaya masyarakat yang cukup tinggi, sehingga sangat mendukung kelancaran kegiatan.

c) Adanya inovasi pengembangan kawasan terpadu KOMPAK CODE di RW 17 dan RW 18 Prawirodirjan yang tahun ini mencapai tahap penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana fisik menjadi tonggak penting untuk mengakselerasi pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat setempat.

b. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian pernyataan kinerja

1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Formasi pegawai Kemantren Gondomanan saat ini baru terpenuhi 74% dari kebutuhan sesuai hasil analisis jabatan, tentu ini belum memadai bagi organisasi Kemantren Gondomanan. Kekurangan personil terutama dirasakan di kelurahan mengingat adanya kebijakan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

merangkap Pejabat Pembuat komitmen (PPKom), untuk melaksanakan tugas dan pelimpahan kewenangan yang semakin besar dan kompleks serta alokasi anggaran yang lebih besar kepada kelurahan. Kebijakan ini telah berjalan beberapa tahun namun tidak/belum disertai dengan penambahan personil. Sesuai hasil analisis jabatan, sebagai konsekuensi pengangkatan Lurah sebagai KPA seharusnya didukung tim/pejabat pengelola keuangan dan kegiatan yang memadai, dimana sesuai ketentuan beberapa jabatan harus diisi oleh PNS/ASN. Pada kenyataannya sudah ada penambahan personil di kelurahan namun hanya diperbolehkan mengangkat tenaga teknis melalui belanja jasa orang perseorangan untuk membantu pelayanan dan administrasi umum kegiatan. Upaya lain dilakukan untuk meningkatkan segi kualitas melalui berbagai bimbingan teknis dan diklat peningkatan kompetensi pegawai. Meskipun demikian, ketika tuntutan beban kerja semakin bertambah maka kemampuan SDM yang ada pun masih dirasa kurang memadai.

2) Kegiatan yang bersifat “penjagaan”

Beberapa kegiatan di program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah khususnya yang bertujuan untuk pemeliharaan dan bersifat penjagaan (misal penggantian suku cadang, pembelian BBM) pada beberapa obyek sulit untuk diprediksi kebutuhannya (kapan perlu ganti suku cadang, penyerapan BBM yang kurang optimal karena mobilitas berkurang, dan sebagainya). Termasuk juga belanja pemakaian listrik/telepon yang tidak bisa tepat sesuai perkiraan dan pagu anggaran yang tersedia. Konsekuensi dari belanja semacam ini adalah target keuangan tidak bisa tercapai 100% (ada sisa anggaran), meskipun target fisik bisa tercapai 100%.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan

gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus melibatkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kemantren Gondomanan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS* (*Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements*) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

9. Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja

1) Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimtren

Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (Forkompimtren) yang terdiri dari Mantri Pamong Praja (selaku koordinator), Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Komandan Rayon Militer (Danramil), Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dibentuk dalam rangka mengemban misi bersama untuk bersinergi menciptakan masyarakat yang aman damai sejahtera sesuai bidangnya masing-masing. Untuk itu diperlukan mekanisme komunikasi, koordinasi, sinergi dan integrasi yang intensif dan efektif agar tujuan dan kepentingan bersama dapat diwujudkan. Beberapa contoh sinergitas yang telah dibangun antara lain :

- Keterlibatan Forkompimtren dalam program kado 17 GM bagi warga usia 17 tahun saat mengurus KTP diberikan bingkisan yang salahsatunya berisi buletin dengan materi yang disusun oleh tim Forkompimtren sebagai bekal informasi yang lengkap bagi remaja yang memasuki usia 17 tahun;
- keterlibatan UPT Puskesmas Gondomanan dan KUA kemantren Gondomanan dalam beberapa proses/prosedur administrasi kependudukan yang terangkum dalam Paket Komanan;
- Sinergitas Forkompimtren bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Petugas PKB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penanganan dan pencegahan kasus stunting, dalam bentuk kegiatan bersama antara lain edukasi kepada masyarakat tentang penanganan dan pencegahan stunting, pemberian bantuan pangan dan gizi, dan keterpaduan gerak dalam kegiatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kemantren Gondomanan;
- Sinergitas Forkompimtren dalam pengamanan proses menuju Pemilu Damai 2024 dan pengamanan perayaan hari-hari besar (Idul Fitri, Idul Adha dan Natal Tahun Baru).
- Sinergitas seluruh jajaran Forkompimtren bersama Tim Penggerak PKK, Bank Sampah dan elemen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Aksi 1124 Gondomanan Bersih untuk Jogja Istimewa;
- Kebersamaan dalam berbagai kegiatan seperti penanganan masalah sosial di wilayah Kemantren Gondomanan, olahraga dan pemantauan wilayah bersama tiap Jumat pagi, dan sebagainya.

2) Sinergitas dalam KOMPAK CODE

KOMPAK CODE (Kolaborasi Mewujudkan Pembangunan Kawasan Bantaran Sungai Code) adalah Inovasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman huni dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sekitar Bantaran Sungai Code Kelurahan Prawirodirjan. Inovasi KOMPAK CODE bertujuan untuk menata kawasan kumuh, meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi risiko bencana, menjadikan

kawasan nyaman huni, dan menambah Ruang Tebuka Hijau Publik (RTHP) sebagai paru-paru kota. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak antara lain : Kelurahan Prawirodirjan, CSR, Lembaga Masyarakat, Dinas PUPKP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Inovasi KOMPAK CODE dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2022, dan saat ini sudah sampai tahapan selesainya pembangunan prasarana fisik, yang akan dilanjutkan dengan pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pertanian perkotaan.

B. Realisasi Anggaran

1. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran Kemantren Gondomanan tahun 2023 sebesar 96,80% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 99,05%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98,95%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, terdapat 3(tiga) program dengan serapan anggara mencapai 100% yaitu : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran dan realisasi belanja yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.16

Anggaran dan Realisasi Belanja Kemantren Gondomanan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Reali sasi	Reali sasi(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Reali sasi(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Gelar Budaya Jogja	1 kali	1 kali	100	100.000.000	100.000.000	100
		Nilai Survey KepuasanMasyarakat	88,62	88,68	100,068	33.645.650	33.645.650	100
		Angka Swadaya Masyarakat	1.032.240.000	1.039.317.000	100,686	2.700.846.768	2.672.909.448	98,97
		Jumlah pelanggaran Perda	140	137	102,86	185.123.000	185.123.000	100
		Prosentase permasa-	100%	100%	100	58.975.000	68.975.000	100

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Reali sasi	Reali sasi(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Reali sasi(%)
		lahan terselesaikan						
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai SAKIP oleh Inspektorat	80(A)	86,47(A)	100	1.107.513.445.	1.095.938.	98,95
Jumlah						4.186.103.843	4.146.591.177	99.05
Total Belanja (dengan Belanja Pegawai)						8.411.902.84.	8.142.792.394	96.80

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan anggaran untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi sangat tinggi. Meskipun demikian ada beberapa komponen biaya yang memang tidak dapat diserap maksimal (100%) karena efisiensi, dengan tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas output yang dihasilkan. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja organisasi maka anggaran dan realisasi program-program dirinci lagi per kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diidentifikasi beberapa kegiatan yang penyerapannya tidak dapat optimal yang akan dianalisis pada sub bab berikutnya.

Tabel III.17

Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Belanja Non Pegawai	4.186.103.843	4.146.591.177	99,06%
1.	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100%**
	Kegiatan : Adat, Seni, Tradisi & Lembaga Budaya	100.000.000	100.000.000	100%
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100%
2.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.333.312.445**	**5.092.139.296**	**95,48%**
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.952.000	42.952.000	100%

	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.600.000	1.600.000	100%
	2) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	3) Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	4) Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	34.752.000	34.752.000	100%
	5) Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	6) Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000	1.800.000	100%
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	100%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.232.999.000	4.003.401.217	94,58%
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.225.799.000	3.996.201.217	94.57%
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.200.000	1.200.000	100%
	3) Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan	1.200.000	1.200.000	100%
	7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keua ngan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	600.000	600.000	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000	600.000	100%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600.000	600.000	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	600.000	600.000	100%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.128.445	153.128.445	100%
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.755.500	3.755.500	100%
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.056.595	47.056.595	100%
	3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.290.000	24.290.000	100%
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.026.350	78.026.350	100%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.340.000	75.610.000	96,52%
	1) Pengadaan Mebel	12.340.000	12.340.000	100%
	2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.000.000	63.270.000	95,86%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.258.000	585.836.153	99,59%
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100%
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	90.170.000	87.788.153	97,36%
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.588.000	496.548.000	99,99%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.435.000	230.011.481	97,28%
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	99.135.000	93.350.368	94,16

	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.300.000	31.300.000	100%
	3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.000.000	105.361.113	99,40%
3.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**33.645.650**	**33.645.650**	100%
	Kegiatan : **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	8.200.000	8.200.000	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8.200.000	8.200.000	100%
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.445.650	25.445.650	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	25.445.650	25.445.650	100%
4.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**2.700.846.748**	**2.672.909.448**	**98,97%**
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.690.000	73.690.000	100%
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.690.000	73.690.000	100%
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.379.761.448	2.351.824.148	98,83%
	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Kelurahan	39.759.772	39.759.772	100%
	2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. Ngupasan	505.491.000	489.763.000	96,89%
	3) Pembangunan sarana dan Prasarana Kel. Prawirodirjan	525.190.000	522.908.700	99,57%
	4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan	854.436.500	854.075.500	99,96%
	5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan	449.389.000	439.822.000	97,87%
	6) Evaluasi Kelurahan	5.495.176	5.495.176	100%
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren	37.063.800	37.063.800	100%
	1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	22.063.800	22.063.800	100%
	2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.000.000	15.000.000	100%
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	210.331.500	210.331.500	100%
	1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28.750.000	28.750.000	100%
	2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	51.017.500	51.017.500	100%
	3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingk. Hidup	24.624.000	24.624.000	100%
	4) Pelatihan keluarga Tanggap Bencana Alam	3.550.000	3.550.000	100%
	5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	102.390.000	102.390.000	100%
5.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**185.123.000**	**185.123.000**	**100%**
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	185.123.000	185.123.000	100%

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	185.123.000	185.123.000	100%
6.	**Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum**	**58.975.000**	**58.975.000**	**100%**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.975.000	58.975.000	100%
	1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	14.375.000	14.375.000	100%
	2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.600.000	44.600.000	100%
B.	**Belanja Pegawai**	**4.225.799.000**	**3.996.201.217**	**94.57%**
	Jumlah	**8.411.902.843**	**8.142.792.394**	**96,80%**

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selain telah terlaksananya program dan kegiatan secara optimal, pada beberapa kegiatan juga telah dilakukan efisiensi sebagai berikut:

Tabel III.18

Data Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Kemantren Gondomanan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Belanja Non Pegawai	4.146.591.177	39.412.666	0,94%
1.	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100.000.000**	**0**	**0%**
	Kegiatan : Adat, Seni, Tradisi & Lembaga Budaya	100.000.000	0	0%
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	0	0%
2.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.092.139.296**	**241.173.149**	**4,52%**
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.952.000	0	0%
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.600.000	0	0%
	2) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.200.000	0	0%
	3) Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.200.000	0	0%
	4) Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	34.752.000	0	0%
	5) Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.200.000	0	0%
	6) Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000	0	0%

	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	0	0%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.003.401.217	229.597.783	5,42%
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.996.201.217	229.597.783	5,43%
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.200.000	0	0%
	3) Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000	0	0%
	4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.200.000	0	0%
	5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	0	0%
	6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan	1.200.000	0	0%
	7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.200.000	0	0%
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	600.000	0	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000	0	0%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600.000	0	0%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	600.000	0	0%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.128.445	0	0%
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.755.500	0	0%
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.056.595	0	0%
	3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.290.000	0	0%
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.026.350	0	0%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.610.000	2.730.000	3,41%
	1) Pengadaan Mebel	12.340.000	0	0%
	2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.270.000	2.730.000	4,13%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.836.153	2.421.847	0.42%
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	0	0%
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	87.788.153	2.381.847	2,64%
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.548.000	40.000	0,01%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.011.481	6.423.519	2,72%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	93.350.368	5.784.632	5,83%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.300.000	0	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.361.113	638.887	0,60%
3.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**33.645.650**	**0**	0%
	Kegiatan : **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	8.200.000	0	0%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	8.200.000	0	0%

	Pelayanan Umum			
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.445.650	0	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	25.445.650	0	0%
4.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**2.672.909.448**	**27.937.300**	**1,03%**
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.690.000	0	0%
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.690.000	0	0%
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.379.761.448	27.937.300	0%
	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan	39.759.772	0	0%
	2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. Ngupasan	505.491.000	15.728.000	3,11%
	3) Pembangunan sarana dan Prasarana Kel. Prawirodirjan	525.190.000	2.821.300	0,43%
	4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan	854.436.500	361.000	9,94%
	5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan	439.822.000	9.567.000	2,13%
	6) Evaluasi Kelurahan	5.495.176	0	0%
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren	37.063.800	0	0%
	1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	22.063.800	0	0%
	2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.000.000	0	0%
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	210.331.500	0	0%
	1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28.750.000	0	0%
	2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	51.017.500	0	0%
	3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	24.624.000	0	0%
	4) Pelatihan keluarga Tanggap Bencana Alam	3.550.000	0	0%
	5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	102.390.000	0	0%
5.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	185.123.000	0	0%
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	185.123.000	0	0%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	185.123.000	0	0%
6.	**Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum**	**58.975.000**	**0**	0%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**58.975.000**	**0**	0%

	1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	14.375.000	0	0%
	2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.600.000	0	0%
B.	**Belanja Pegawai**	**3.996.201.217**	**229.597.783**	**5,43%**
	Jumlah	**8.142.792.394**	**269.110.449**	**3,20%**

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Data efisiensi dalam hal ini merupakan data anggaran yang tidak/belum dapat dilaksanakan/direalisasikan dikarenakan sebab-sebab eksternal maupun internal. Selain itu dapat dijelaskan pula penyebab tidak/belum terserapnya anggaran untuk program/kegiatan tersebut. Meskipun demikian, inefisiensi tersebut nilainya cukup kecil sehingga tidak mengganggu tingkat pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu diidentifikasi pada pos anggaran dan kode rekening mana saja yang masih rendah capaiannya, untuk diantisipasi agar program/kegiatan dapat direalisasikan secara lebih efisien dan efektif.

Hasil identifikasi menunjukkan efisiensi yang cukup besar terjadi pada program-program :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serapan terendah sebesar 95,48% pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hal ini disebabkan karena penentuan anggaran dari BPKAD sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD .
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat efisiensi pada sub-sub anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang berupa paket kegiatan pembangunan fisik karena komponen-komponen biayanya menyesuaikan fluktuasi harga pasar, hasil negosiasi, dan tingkat ketepatan perencanaan dengan kondisi yang ada di lapangan.

C. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan

dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2023 Kemantren Gondomanan telah melakukan beberapa inovasi baik yang berupa inovasi baru maupun keberlanjutan dari inovasi yang telah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya antara lain sebagai berikut:

a. Inovasi Paket Pelayanan Komanan

   Inovasi ini telah berjalan sejak tahun 2020 namun masih dirasakan manfaatnya sehingga terus dikembangkan disesuaikan dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Inovasi ini juga sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pernyataan kinerja oleh karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban.

   Pelaksanaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan sesuai dengan aturan yang ada terkait pelayanan dengan maksud agar masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.

b. Sosialisasi Pelayanan secara Virtual

   Berupa pembuatan video pendek tentang sistem prosedur dan tatacara mengakses pelayanan, yang kemudian dipublikasikan melalui website, media sosial dan grup *Whatsapp* warga agar semua lapisan masyarakat semakin memahami dan semakin mudah dalam mengakses layanan.

c. Pendampingan Layanan

   Pendampingan oleh petugas diberikan kepada warga yang memiliki keterbatasan kemampuan mengakses teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung layanan. Beberapa warga berusia lanjut, difabel atau keluarga miskin kemungkinan menghadapi masalah dalam mengakses layanan berbasis online, sehingga perlu difasilitasi dan didampingi.

d. Inovasi Gondomanan Bersih Untuk Jogja Istimewa

Kegiatan Gondomanan Bersih untuk Jogja Istimewa adalah gerakan kerja bakti massal untuk menjaga lingkungan dengan melibatkan segenap stakeholders yang bersinergi secara harmonis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan partisipasi segenap stakeholders dalam menjaga dan mengelola kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Inovasi ini sudah berjalan beberapa tahun dan hasil nyata dari inovasi ini adalah Kemantren Gondomanan beberapa kali meraih predikat Kecamatan Adipura.

e. KOMPAK CODE (Kolaborasi Mewujudkan Pembangunan Kawasan Bantaran Sungai Code)

KOMPAK CODE adalah Inovasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman huni dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sekitar Bantaran Sungai Code Kelurahan Prawirodirjan. Inovasi ini dilatarbelakangi kondisi wilayah Bantaran Sungai Code wilayah Kampung Prawirodirjan yang memiliki karakteristik padat hunian, keterbatasan akses transportasi dan kumuh. Dalam penilaian risiko bencana di bantaran sungai code, terdapat beberapa bencana yang utama antara lain banjir, kebakaran, angin putting beliung dan gempa bumi. Secara sosial ekonomi, masyarakat di wilayah ini rata-rata berpenghasilan menengah ke bawah dengan mata pencaharian warung, jajan pasar, srabutan.

Inovasi KOMPAK CODE bertujuan untuk : menata kawasan kumuh, meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi risiko bencana, menjadikan kawasan nyaman huni, dan menambah Ruang Tebuka Hijau Publik (RTHP) sebagai paru-paru kota. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak antara lain : Kelurahan Prawirodirjan, CSR, Lembaga Masyarakat, Dinas PUPKP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Inovasi KOMPAK CODE dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2022, dan saat ini sudah sampai tahapan selesainya pembangunan prasarana fisik, yang akan dilanjutkan dengan pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pertanian perkotaan.

f. MAS JAKA PRAWIRO

Inovasi MAS JAKA PRAWIRO adalah program optimalisasi jalur evakuasi/inspeksi di pinggir Kali Code RW 14 dan RW 15 Kelurahan Prawirodirjan Kemantren Gondomanan. Inovasi ini merupakan bagian dari kerangka KOMPAK CODE dengan fokus pengembangan jalur inspeksi sepanjang bantaran Sungai Code yang lebih tertata, aksesible, sekaligus berfungsi optimal sebagai jalur untuk memantau aliran sungai dan mengurangi risiko bencana yang sewaktu-waktu mengancam kawasan tersebut.

g. DASI BUKEMAN

Inovasi DASI BUKEMAN (Digitalisasi Arsip Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) adalah upaya untuk mengelola dan menyimpan dokumen/data umum kepegawaian secara lebih aman, tertib dan teratur melalui proses digitalisasi. Sebagaimana diketahui, data dan dokumen umum kepegawaian sangat penting untuk keberlangsungan organisasi dan karir pegawai. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah pencarian data/dokumen apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, menghemat tempat penyimpanan, dan mengamankan dokumen agar tidak mudah rusak/hilang. Untuk tahap awal dokumen yang didigitalisasikan adalah dokumen kepegawaian, berita acara rekonsiliasi barang/aset, dan asli/salinan surat keputusan Mantri Pamong Praja. Tahap selanjutnya diupayakan dokumen keuangan dan dokumen lainnya juga akan didigitalisasi dan disimpan dalam google drive.

2. Prestasi

Kemantren Gondomanan selama kurun waktu tahun 2023 telah menorehkan beberapa prestasi sebagai berikut :

a. Kemantren Gondomanan meraih predikat sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Daerah DIY pada bulan Agustus 2023;
b. Kemantren Gondomanan meraih Peringkat IV Lomba Evaluasi Kinerja Kemantren tingkat Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2023;

c. Kemantren Gondomanan meraih Peringkat VIII Perangkat Daerah dengan nilai Akuntabilitas Kinerja A dengan nilai SAKIP 86,47 pada bulan Desember 2023.
d. Kemantren Gondomanan (diwakili RW 12 Kelurahan Prawirodirjan) meraih Peringkat I Lomba Kampung KB (Keluarga Berkualitas) Tingkat DIY pada bulan Maret 2023.
e. Kafilah Kemantren Gondomanan meraih Juara Umum Lomba MTQ Tingkat Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2023.
f. Juara I Lomba Pemuda Pelopor Tingkat Kota Yogyakarta Bidang Pendidikan atas nama Dhea Alifia Putri Widowati (RW 15 Kel. Prawirodirjan) pada bulan Agustus 2023.
g. Juara I Lomba Pemuda Pelopor Tingkat DIY Bidang Pendidikan atas nama Dhea Alifia Putri Widowati (RW 15 Kel. Prawirodirjan) pada bulan September 2023
h. Juara I Lomba PSM Berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta atas nama Karman Among Wibowo (RW 11 Kel. Prawirodirjan) pada bulan September 2023
i. Kemantren Gondomanan meraih Juara III Lomba Living Museum Tingkat Kota Yogyakarta pada bulan September 2023.
j. Kemantren Gondomanan (diwakili Kelurahan Prawirodirjan) menjadi finalis Kampung Harmoni Tingkat Kota Yogyakarta.
k. Bank Sampah Ngudi Resik Gondomanan meraih Juara I Lomba Lampion Anugrah Lingkungan Tingkat Kota Yogyakarta.
l. Bank Sampah Sejahtera Gondomanan meraih predikat Bank Sampah Legend dalam Anugrah Lingkungan Tingkat Kota Yogyakarta.
m. Bank Sampah Gangsal Gondomanan meraih Juara Harapan I Lomba Cerdas Cermat dalam Anugrah Lingkungan Tingkat Kota Yogyakarta.
n. Kelurahan Prawirodirjan meraih Peringkat III kategori Kelurahan dalam Pemilihan Gender Champion Tingkat Kota Yogyakarta.

D. Tindak Lanjut Rekomendasi LKIP Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Inspektorat Kota Yogyakarta dengan nomor : X.713/81/E.AKIP/B/VI/2023 tertanggal 12 Juni

2023, nilai AKIP yang diperoleh Kemantren Gondomanan untuk tahun 2022 adalah sebesar **86,47** atau berada pada predikat **A (Sangat Baik**).

Dari hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 ada beberapa catatan dan rekomendasi terhadap LKIP Kemantren Gondomanan yang kemudian menjadi komitmen seluruh entitas organisasi Kemantren Gondomanan untuk menindaklanjutinya. Komitmen ini merupakan upaya terus menerus yang dilakukan untuk menuju keadaan dan mencapai kinerja yang lebih baik lagi.

Tindaklanjut rekomendasi terhadap LKIP tahun 2022 dilaksanakan sejak diterimanya hasil penilaian LKIP oleh Inspektorat. Mantri Pamong Praja segera mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan. Dengan demikian potensi kesalahan dan keterlambatan dapat segera diminimalkan bahkan ditiadakan.

Tabel III.18

Rekomendasi Inspektorat terhadap LKIP 2022 dan Tindaklanjutnya

No.	Komponen	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindaklanjut	Bukti Dukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan Kinerja bobot :30% nilai 29,36	Seluruh dokumen perencanaan telah tersedia dengan lengkap, memenuhi standar yang baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	---	---	---
2	Pengukuran Kinerja bobot :30% nilai : 29,36	Terdapat kegiatan dan sub kegiatan pada TW II yang belum mencapai target TW II	Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai target tiap triwulan pada tahun berjalan.	Memperkuat monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan mengadakan rakor monev setiap bulan dan insidentil.	Notulensi rakor monev capaian kinerja
3	Pelaporan Kinerja bobot :15% nilai : 13,59	Pendokumentasian proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja berkala sebagai bentuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja belum optimal (dokumen-tasi tindak lanjut dalam Berita Acara Desk Timbal Balik belum lengkap).	Meningkatkan dokumentasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dalam Berita Acara Desk Timbal Balik.	Mendokumentasikan BA Desk Timbal Balik dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi secara kontinyu.	BA Desk Timbal Balik Triwulan I-IV tahun 2023

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot :25% nilai 14,19	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, namun setiap komponen akuntabilitas kinerja masih dievaluasi secara terpisah dan belum sesuai dengan Permenpan RB No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Permenpan RB No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Memperkuat monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan mengadakan rakor monev setiap bulan dan insidentil.	Notulensi rakor monev capaian kinerja

Sumber : Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022.

Tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

a) Meningkatkan dokumentasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dalam Berita Acara Desk Timbal Balik.

b) Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai target tiap triwulan pada tahun berjalan.

c) Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan menuju *Good Governance* dalam rangka reformasi birokrasi yang berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan tetapi juga berorientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang digunakan untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kemantren Gondomanan untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, adalah dengan mendorong pengendalian serta evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, tahun 2023 Kemantren Gondomanan memiliki 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1) Tujuan : Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan;
   Sasaran : Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat.
2) Tujuan : Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan;
   Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara umum Kemantren Gondomanan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel III.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Target					Sumber data
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi 1:	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat							
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat per kembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	367	**368**	369	370	371	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan
Misi 2:	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat							
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	81(A)	81(A)	81(A)	81(A)	81(A)	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Sumber : Renstra Kemantren Gondomanan 2022-2026

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel VII-C Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel III.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	≥ 91	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Membandingkan antara target dengan capaian kinerja akan semakin menarik apabila disajikan pula prosentase dari capaian kinerja tersebut. Untuk mencari prosentase capaian kinerja per kegiatan digunakan rumus ***: (realisasi capaian kinerja : target) x 100***. Sedangkan untuk mencari prosentase kualitas dari realisasi capaian kinerja program digunakan rumus: ***(jumlah prosentase capaian kinerja kegiatan: jumlah kegiatan)***.

Tabel III.3

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan,2023

Nilai yang didapat kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Capaian kinerja organisasi Kemantren Gondomanan pada Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel III.4

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran/Tujuan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/Tujuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	368	368,3	100,082
Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Nilai Reformasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	A(81)	AA (90,83)	121,358

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis "***Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat"*** adalah **100,082%** dengan predikat peringkat kinerja **Sangat Tinggi.**

Upaya pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat, didukung dengan 5(lima) program yaitu :

1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan indikator kinerja terlaksananya Gelar Budaya Jogja;
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat meningkat;
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,. dengan indikator kinerja angka swadaya masyarakat meningkat;
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator kinerja jumlah pelanggaran Perda menurun, dan;
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator prosentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi.

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis "***Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat"*** adalah **121,358%** dengan predikat peringkat kinerja **Sangat Tinggi.**

Upaya pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat, didukung dengan 1(satu) program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Kemantren Gondomanan meningkat.

Selanjutnya capaian kinerja program Kemantren Gondomanan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel perbandingan target dan realisasi indikator program sebagai berikut:

Tabel III.5

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persen-tase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)
Sasaran 1 : Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan Meningkat					
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Gelar Budaya Jogja	1 kali	1 kali	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,62	88,68	100,068%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni Masyarakat	Rp 1.032.240.000	Rp 1.039.317.000	100,686%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda	140	136	102,86%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan Meningkat					
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Kemantren Gondomanan	80 (A)	86,47 (A)	100%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Rumus penghitungan nilai indikator capaian program-program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan, dengan indikator terlaksananya Gelar Budaya Jogja.

Program ini merupakan serangkaian kegiatan yang puncaknya adalah Living Museum, pentas seni, kirab budaya dan gelar potensi UMKM dalam rangka peringatan Hari Keistimewaan Yogyakarta yang jatuh

pada tanggal 31 Agustus 2023. Target kegiatan ini dinyatakan dalam angka 1(satu) kali dan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar sehingga prosentase capaian kinerja yang diperoleh adalah **100%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, dihitung menggunakan rumus perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta. Formulanya adalah :

Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25.

Berdasarkan capaian kinerja program di Tahun Anggaran 2022 pada tabel di atas maka prosentase capaian kinerja terhadap indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari target 88,62 tercapai **88,68** prosentase capaian **100,068%** dengan kategori predikat kinerja **Sangat Tinggi.**

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Angka Swadaya Masyarakat, diperoleh dari jumlah angka swadaya murni masyarakat di Kelurahan se Kemantren Gondomanan selama setahun.

Sumber data angka swadaya masyarakat adalah laporan nilai swadaya masyarakat kelurahan, yaitu jumlah angka nominal kegiatan yang dibiayai secara swadaya oleh masyarakat. Data nilai swadaya masyarakat kelurahan se Kemantren Gondomanan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.6

Data Nilai Swadaya Murni Masyarakat Tahun 2023

NO	Kelurahan	Nilai swadaya murni tahun 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Ngupasan	468.430.000
2.	Prawirodirjan	570.887.000
	Total swadaya murni	1.039.317.000
	Target swadaya murni	1.032.240.000
	Persentase capaian	100,686 %

Sumber : Laporan Swadaya Murni Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan, 2023.

Berdasarkan data capaian kinerja program di Tahun Anggaran 2023 pada tabel diatas maka untuk indikator swadaya masyarakat tercapai Rp1.039.317.000,- dari target Rp1.932,240.000,- sehingga prosentase capaian kinerjanya **100,686%** dengan kategori predikat kinerja **Sangat Tinggi**.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator penurunan jumlah pelanggaran Perda, dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaran Perda dengan target yang ditetapkan berdasarkan trend jumlah pelanggaran selama 3 (tiga) tahun terakhir. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Target} - (\textbf{realisasi} - \textbf{target})}{\textbf{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data laporan Jawatan Keamanan diketahui bahwa jumlah pelanggaran Perda yang terjadi di wilayah Kemantren Gondomanan sepanjang tahun 2023 tercatat 136 kali dari target yang ditetapkan 140 kali, atau terjadi penurunan 2,14%. Dari formula diatas maka dapat diketahui prosentase capaian kinerja program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tahun Anggaran 2023 untuk adalah **102,86%** dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator prosentase permasalahan di bidang pemerintahan umum yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi, dihitung dengan

membandingkan jumlah permasalahan yang ada dengan jumlah permasalahan yang terselesaikan. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah permasalahan yang ada}}{\textbf{Jumlah permasalahan yang terselesaikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data laporan Jawatan Praja diketahui bahwa semua permasalahan di bidang pemerintahan umum selama tahun 2023 telah dapat diselesaikan sehingga prosentase capaian kinerja program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tahun Anggaran 2023 untuk adalah **100%** dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemantren Gondomanan.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah merupakan hasil evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) tingkat Kota Yogyakarta terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 beserta kelengkapan bukti dukung yang dibutuhkan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Inspektorat Kota Yogyakarta dengan nomor : X.713/81/E.AKIP/B/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023, nilai AKIP yang diperoleh Kemantren Gondomanan untuk tahun 2022 adalah sebesar **86,47** atau berada pada predikat **A (Sangat Baik**).

Dari target nilai **80(A)** maka prosentase capaian yang diperoleh adalah **100%** atau termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Dalam upaya merealisasikan program-program tersebut diatas secara efektif dan efisien maka perlu didukung aspek keuangan. Pada tabel dibawah ini ditunjukkan perbandingan target dan realisasi capaian kinerja keuangan program Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel III.7

Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi

Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000	100.000.000	100 %
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33.645.650	33.645.650	100 %
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 700 846 748	2 672 909 448	98,97 %
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	185.123.000	185.123.000	100%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.975.000	58.975.000	100%
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.333.312.445	5.092.139.296	95,48 %
	Jumlah/rata-rata	**8.411.902.843**	**8.142.792.394**	**96,80 %**

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian target kinerja keuangan semua program berada diatas 91% atau masuk kategori capaian **Sangat Tinggi**. Bahkan untuk program kerja yang menjadi substansi dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai realisasi rata-rata 99,06%. Kondisi ini secara umum menunjukkan bahwa Kemantren Gondomanan telah menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan yang baik dan mampu melaksanakan semua rencana secara efektif dan efisien serta mencapai target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.8

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkem-bangan pemba-ngunan Keman-tren Gondoma-nan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	367	368	367, 36	368,3	100, 1	100,082
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Nilai reformasi birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	81(A)	81(A)	86,47 (A)	90,83 (AA)	106,75	121,358

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis "***Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat***" tahun 2023 mengalami penurunan 0.06 point dari capaian tahun sebelumnya, namun prosentase capaian kinerjanya sama. Hal ini menunjukkan bahwa tetap ada dinamika dan peningkatan dalam komponen-komponen parameter yang menyusun indikator nilai tingkat perkembangan pembangunan kelurahan/kemantren meskipun dalam skala yang kecil karena dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2022-2023, diantaranya dampak pandemi Covid19 yang mulai melandai pada periode tersebut.

Dari data hasil penilaian tingkat perkembangan pembangunan di level kelurahan maka diketahui bahwa Kelurahan Prawirodirjan mendapatkan nilai sedikit lebih tinggi (368,6) daripada Kelurahan Ngupasan (368). Hal ini disebabkan perkembangan infrastruktur sarana prasarana dan dinamika kegiatan sosial ekonomi masyarakat di kelurahan Prawirodirjan pada tahun 2023 yang dinilai relatif lebih cepat, terutama

dengan adanya inovasi pengembangan kawasan Lembah Code di RW 17 dan RW 18 Prawirodirjan (KOMPAK CODE/Kolaborasi Pengembangan Kawasan Lembah Code). Kegiatan yang berupa pembangunan sarana prasarana fisik dan fasilitas publik di bantaran sungai Code ini merupakan bentuk sinergitas pengembangan kawasan dengan Dinas PUPKP Kota Yogyakarta dan Kelurahan Prawirodirjan yang sudah tertuang dalam dokumen *masterplan* Perencanaan Strategis Kelurahan Prawirodirjan, yang bertujuan untuk mengubah kawasan kumuh menjadi layak huni dan membangun sarana prasarana pendukung untuk kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat setempat.

Capaian kinerja sasaran strategis "***Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat***" tahun 2023 mengalami peningkatan 4.36 point dari capaian tahun sebelumnya, demikian pula prosentase capaian kinerjanya meningkat 14,6%. Hal ini menunjukkan proses internalisasi, pelaksanaan dan pendokumentasian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kemantren Gondomanan yang semakin baik. Selain itu, tindak lanjuti terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai hasil pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2023.

Capaian kinerja sasaran strategis yang sangat tinggi tenty tidak dapat dilepaskan dari capaian kinerja program-program yang mendukungnya. Pada tabel berikut memperlihatkan perbandingan capaian target kinerja masing-masing program pada tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.9

Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023
dengan Tahun-tahun Sebelumnya

No	Program	Indikator	Target Tahun				Capaian dan Prosentase Realisasi Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaab	Gelar Budaya Jogja	-	-	-	1 kali	-	-	-	1 kali (100%)
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87,7	87,9	87,9	88,62	87,7 (100%)	88,57 (101%)	88,62 (100,06%)	88,68 (100,068%)
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	460.000 .000	469.200 .000	478.584 .000	1.032.240. 000	759.386 .500 (165,08 %)	480.256 .250 (102%)	515.392. 000 (107,69%)	1.039.317. 000 (100,686%)
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggar-an Perda	-	160	157	140	-	145 (109,38 %)	152 (103,18%)	136 (102,86%)
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase penyelesai an masalah pemerintah an umum	-	-	-	100%	-	-	-	100% (100%)
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	-	-	80(A)	80 (A)	-	-	87,19 (A) (100%)	86,47 (A) (100%)

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Sedangkan persentase perbandingan capaian kinerja keuangan masing-masing program Kemantren Gondomanan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel III.10

Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Program/Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja (%)			
		2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(6)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	-	-	-	100 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	94,60	99,12	99,65	100 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	98,95	98,02	99,19	98,97 %
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	99,94	100	100%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98,95	98,02	99,19	100%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,29	94,87	92,83	95,48 %
					96,80 %

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Gambar 3

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

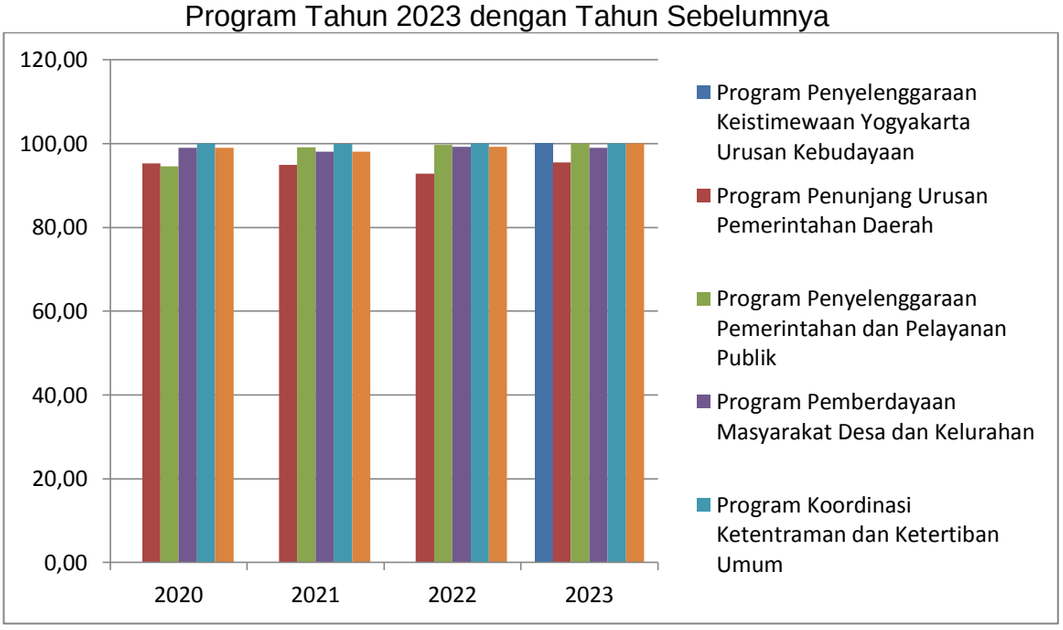

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam menilai pencapaian tujuan jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra maka perlu dievaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun apakah sudah selaras dengan target tujuan tersebut.

Tabel III.11

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir Renstra

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/ Tujuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 ter hadap target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	368	368,3	371	99,27%
Meningkatkan Nilai reformasi birokrasi Kemantren Gondomanan	Nilai reformasi birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai reformasi birokrasi Kemantren Gondomanan	81(A)	90,83 (AA)	81(A)	121,358%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Dari data tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja utama semakin mendekati target akhir Renstra, sehingga dapat diharapkan target akhir Renstra akan dapat dicapai dengan baik tanpa kendala yang berarti.

Selanjutnya capaian indikator kinerja program terhadap target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.12

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Prosentase capaian tahun ini terhadap target akhir Renstra
(1)	(2)		(6)	(7)	(8)	(6)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Gelar Budaya Jogja	1 kali	1 kali	1 kali	100%
2	Program Penyelengga-raan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,62	88,68	88,75	99,92%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	1.032.240.000	1.039.317.000	1.072.776.000	98,88%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	140	136	110	124,5%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase penyelesaian masalah sbg hasil koordinasi	100%	100%	100%	100%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi/SAKIP	80(A)	86,47(A)	80(A)	100%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis dan semua program di Kemantren Gondomanan masuk kategori Sangat Tinggi dengan prosentase capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Tentu hal ini tidak terlepas dari peran faktor-faktor yang mendukung kinerja Kemantren Gondomanan tersebut. Meskipun masih ada beberapa faktor penghambat, namun berkat sinergi yang kuat antara Pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* serta motivasi dan semangat untuk melayani dengan hati, maka hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi dan diminimalisir.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Organisasi Sejenis

Sebagai bagian dari upaya perbaikan yang terus menerus maka perlu dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan capaian instansi/ organisasi sejenis. Kemantren Gondomanan telah melakukan perbandingan capaian kinerja dengan capaian instansi/organisasi sejenis dengan cara melihat data capaian kinerja di data LKIP pada website beberapa Kemantren lain sebagaimana terlihat pada matriks berikut :

Tabel III.13

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Instansi/ Organisasi Sejenis

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Kemantren Tahun 2022 (Target/Realisasi)				Keterangan
		Gondomanan	Ngampilan	Kraton	Gedongtengen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren	366,5 / 367	389 / 396,5	346,67 / 346,67	370 / 371,5	
2	Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	Belum dijadikan IKU Program
3	Nilai Hasil Survei SKM	87,9 / 88,57	84,15 / 84,16	77,19 / 85,25	81,59 / 81,60	
4	Penurunan Angka Pelanggaran Perda	160 / 145	240 / -	100 / 38	96 / 94	
5	Angka Swadaya Murni	469.500.000 / 1.962.512.500	684.460.000 / 692.230.000	429.601.667 / 964.503.000	632.535.000 / 1.014.273.100	

Sumber : Analisis Data LKIP 2022 di Website Kemantren Gondomanan, Ngampilan, Kraton dan Gedongtengen.

Dari data perbandingan tersebut diatas maka diketahui bahwa penetapan target dari masing-masing Kemantren nilai baseline nya berbeda-beda, namun rata-rata realisasinya tercapai 100% atau lebih.

5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kemantren Gondomanan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat

Sasaran strategis tahun 2023 "***Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat"*** telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, dan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maka optimis target akhir Renstra di tahun keempat akan dapat dicapai. Selain itu, capaian target pada program-program yang mendukung sasaran strategis juga telah tercapai sesuai target yang ditetapkan bahkan melebihi target. Hal ini juga menunjukkan trend positif pencapaian kinerja program di tahun-tahun mendatang.

Penjelasan capaian kinerja pada masing-masing indikator program adalah sebagai berikut :

(1) Gelar Budaya Jogja

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan merupakan program baru yang dilaksanakan di 14 Kemantren di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebagai respon terhadap alokasi Dana Keistimewaan yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk setiap kemantren. Gelar budaya Jogja sebagai puncak peringatan Hari Keistimewaan Yogyakarta yang jatuh pada tanggal 31 Agustus diisi dengan beberapa kegiatan yaitu :

- Living Museum di Gedung ex Telkom Jalan Pangurakan;
- Pawai Budaya dari 7 (tujuh) kampung;
- Pentas Seni dari 7 (tujuh) kampung; dan
- Gelar potensi UMKM Gondomanan.

Seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar dengan dukungan seluruh stakeholder dan elemen masyarakat yang terrepresentasi pada 7 (tujuh) kampung.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini juga menorehkan prestasi Kemantren Gondomanan sebagai Juara III Lomba Living Museum Tingkat Kota Yogyakarta.

(2) Nilai survei kepuasan masyarakat,

Data akhir kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dari setiap unit pelayanan dengan data kuesioner berjumlah 150 responden. Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan

masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11. Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.14 Nilai Unsur Pelayanan

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	3,473
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,593
3	Waktu Penyelesaian	3,560
4	Informasi Pelayanan *)	3,567
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,547
6	Kompetensi Pelaksana **)	3,613
7	Perilaku pelaksana **)	3,707
8	Maklumat Pelayanan	3,593
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,593

Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan, 2023

Untuk mengetahui nilai survey unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut : (3,473x 0,11) + (3,593x 0,11) + (3,560x 0,11) + (3,567 x 0,11) + (3,547x 0,11) + (3,613x 0,11) + (3,707x 0,11) + (3,593x 0,11) + (3,593x 0,11) = 3,547. Jadi Nilai survei adalah **3.547**. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar = 3,547x25 =**88,68**
- Mutu pelayanan **A (Sangat Baik)**.
- Kinerja unit pelayanan **Sangat Memuaskan**.

Dari data tersebut maka dapat diketahui bahwa dari target 88,62

tercapai 88,68 atau prosentase capaian 100,068%.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tinggi harus dipertahankan. Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval SKM 3,5324 - 4,00 atau Sangat Memuaskan.

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023 ditemukan adanya aspek pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu : aspek Perilaku pelaksana dengan nilai 3,707. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat puas dengan sikap dan perilaku petugas pelayanan di Kemantren Gondomanan. Terhadap aspek ini maka perlu untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan perilaku pelaksana pelayanan yang positif dan produktif dengan cara :

a. selalu mengingatkan kepada petugas pelaksana pelayanan untuk berperilaku yang baik dan responsif dalam melayani;
b. mengikutsertakan petugas pelaksana pelayanan pada diklat-diklat pengembangan kompetensi teknis pelayanan; dan
c. memberikan reward bagi petugas pelayanan yang berprestasi.

Adapun unsur pelayanan dengan nilai terendah pada aspek Persyaratan (dengan nilai 3.473) dan aspek Produk spesifikasi jenis pelayanan (dengan nilai 3.547). Terhadap kedua aspek ini maka perlu dianalisis penyebab dan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Upaya untuk meningkatkan nilai pada aspek tersebut antara lain sebagai berikut :

a. membuat E-Katalog pada layanan *WhatsApp* Kemantren Gondomanan sehingga masyarakat dapat melihat persyaratan pelayanan pada katalog tersebut, menampilkan pada website Kemantren, dan warga dapat langsung melihat tanpa harus datang langsung ke Kemantren.
b. mengarahkan pemohon layanan administrasi kependudukan untuk mengajukan permohonan secara online menggunakan JSS (Jogja Smart Services); dan

c. untuk aspek Produk spesifikasi jenis pelayanan, memberikan informasi melalui e-katalog WA Kemantren, bahwa produk pelayanan di Kemantren sesuai Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Secara Elektronik.

Selain mengupayakan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut diatas, guna mendapatkan feedback yang lebih cepat dari pengguna layanan dan respon tinggi terhadap adanya aspek layanan yang perlu dibenahi atau diperbaiki maka dilakukan *cut off* survei kepuasan layanan pada pertengahan tahun (akhir Juni 2023). Dengan demikian maka diharapkan jika ditemukan permasalahan layanan akan cepat ditangani tanpa harus menunggu hasil akhir survei.

(3) Angka swadaya masyarakat, dari target Rp 1.032.240.000,- tercapai sebesar Rp 1.039.317.000,- atau prosentase capaian 100,686% dari target yang ditetapkan.

Dari pencermatan laporan diperoleh data bahwa angka swadaya murni di Kelurahan Ngupasan tercapai sebesar Rp468.430.000,- dan di Kelurahan Prawirodirjan tercatat Rp570.887.000,-.

Secara umum terdapat peningkatan angka target dan capaian swadaya masyarakat dari tahun sebelumnya (target 2022 Rp478.584.000 tercapai Rp515.292.000,-) namun prosentase capaian menurun dari tahun sebelumnya (tahun 2022 prosentase capaian 107,67%). Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan sosial masyarakat (pertemuan/rapat rutin RT, RW, PKK, Dasawisma) yang pada masa pandemi harus dikurangi atau ditiadakan untuk sementara, sehubungan dengan situasi pandemi yang mulai melandai maka kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan berangsur-angsur normal kembali. Selain itu makin tingginya angka swadaya masyarakat juga terdorong dengan adanya Gelar Budaya Jogja yang didukung oleh seluruh warga masyarakat melalui RW/Kampung dalam bentuk keterlibatan pada pawai budaya, pentas seni, Living Museum dan gelar potensi UMKM.

(4) Jumlah pelanggaran Perda

Jumlah pelanggaran Perda mengalami penurunan dari target yang ditetapkan karena kegiatan penegakan Perda sudah tidak lagi diintensifkan simultan dengan kegiatan penegakan protokol kesehatan pencegah penyebaran Covid-19. Persentase pelanggaran terbanyak adalah pedagang kakilima (PKL) yang tumbuh menjamur terutama pada musim liburan. Temuan pelanggaran PKL antara lain berjualan di lokasi yang tidak diijinkan untuk berjualan (kawasan pedestrian), tidak menjaga kebersihan, dan tidak menaati protokol kesehatan. Selain itu ada juga pemasangan reklame/poster/banner yang tidak pada tempatnya, dan pelanggaran IMB.

Upaya penegakan Perda yang dilakukan antara lain : merelokasi PKL yang berjualan di kawasan pedestrian Jalan KHA Dahlan, penertiban PKL, dan patroli terpadu bersinergi dengan Forkompim Kemantren Gondomanan (Polsek, Koramil, Puskesmas, BKO, Satuan Linmas, dan Forum Komunitas Alun-alun Utara).

Potensi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum lainnya yang muncul di tahun 2023 adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024 yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, pemasangan APK di titik-titik tertentu yang berdekatan oleh beberapa kontestan peserta Pemilu juga menimbulkan potensi konflik horisontal antar pendukung calon legislatif/partai politik tertentu. Terhadap pelanggaran pemasangan APK sampai dengan akhir tahun 2023 baru sebatas didata dan dilaporkan, karena tindakan pencopotan baru dapat dilakukan apabila sudah mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta.

(5) Prosentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Indikator prosentase permasalahan di bidang pemerintahan umum yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi dihitung dengan membandingkan jumlah permasalahan yang ada dengan jumlah permasalahan yang terselesaikan. Dari laporan Jawatan Praja diketahui bahwa semua permasalahan di bidang pemerintahan

umum selama tahun 2023 telah dapat diselesaikan sehingga prosentase capaian kinerja program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tahun Anggaran 2023 untuk adalah **100%** dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**. Berdasarkan catatan notulensi rapat koordinasi Forkompimtren Gondomanan, permasalahan yang ditangani melalui koordinasi antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel III.15

Permasalahan yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Forkompimtren Gondomanan tahun 2023

No	Permasalahan	Stakeholder yang Terlibat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemasangan APK di Jembatan Surokarsan	- Forkompimtren Gondomanan & Mergangsan - Panwascam Gondomanan & Mergangsan - Ka Jawatan Praja dan Ka Jawatan Keamanan - BKO Satpol PP	Lokus kejadian di perbatasan dan pelaku yang terlibat insiden dari Gondomanan & Mergangsan.
2.	Pelaksanaan Pemilu Damai dan Rencana pengamanan Logistik Pemilu 2024	- Forkompimtren Gondomanan - PPK dan PPS se Gondomanan - Panwascam Gondomanan - Ka Jawatan Praja dan Ka Jawatan Keamanan - BKO Satpol PP	Rapat koordinasi dan keterlibatan dalam kampanye/sosialisasi Pemilu Damai
3.	Penanganan dan pencegahan stunting	- Forkompimtren Gondomanan Petugas PLKB - Lurah Ngupasan dan Prawirodirjan	Rapat koordinasi dan ekspose peran masing-masing dalam lokakarya stunting
4.	Pengamanan hari-hari besar (Lebaran, Idul Adha dan Nataru)	- Forkompimtren Gondomanan - Ka Jawatan Keamanan - BKO Satpol PP	Rapat koordinasi dan keterlibatan dalam pengamanan

Sumber : Laporan Jawatan Praja Kemantren Gondomanan Tahun 2023

b. Sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat

Sasaran strategis tahun 2023 "***Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat"*** telah tercapai sesuai target

yang ditetapkan, dan berdasarkan capaian pada tahun sebelumnya maka optimis target akhir Renstra di tahun keempat akan dapat dicapai. Selain itu, capaian program yang mendukung sasaran strategis ini juga telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan trend positif pencapaian kinerja program di tahun-tahun mendatang. Penjelasan capaian kinerja pada indikator program yang mendukung sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Program : Nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 oleh Inspektorat,

Target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah 80(A) dan tercapai 86,47(A) atau prosentase capaian 108,99% jika didasarkan pada nilai yang diperoleh, atau 100% jika basis capaian adalah predikat (A atau Memuaskan). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Korta Yogyakarta pada Kemantren Gondomanan Tahun 2022, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta adalah sebesar 86,47 dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang "memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan Kinerja, dengan bobot sebesar 30% dengan nilai 29,53. Seluruh dokumen perencanaan telah tersedia dengan lengkap, memenuhi standar yang baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
b) Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30% dengan nilai 29,36. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yaitu terdapat kegiatan dan sub kegiatan pada TW II yang belum mencapai target TW II.
c) Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15% dengan nilai 13,39. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yaitu pendokumentasi proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja berkala sebagai bentuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja belum optimal

(dokumentasi tindak lanjut dalam Berita Acara Desk Timbal Balik belum lengkap).

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 25% dengan nilai 14,19. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yaitu, evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, namun setiap komponen akuntabilitas kinerja masih dievaluasi secara terpisah dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi maka Tim Penilai Inspektorat Kota Yogyakarta selanjutnya merekomendasikan sebagai berikut :

a) Meningkatkan dokumentasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dalam Berita Acara Desk Timbal Balik.
b) Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai target tiap triwulan pada tahun berjalan.
c) Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terhadap beberapa rekomendasi tersebut maka Kemantren Gondomanan telah menindaklanjuti sebagaimana mestinya, yang akan diuraikan di bagian akhir Bab ini.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dari hasil analisis laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kemantren Gondomanan tahun 2023 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat dinyatakan bahwa Kemantren Gondomanan telah berhasil mencapai target dan tujuan organisasi. Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1) Faktor internal

(a) Ketersediaan anggaran yang semakin memadai

Program kerja yang direncanakan dapat terlaksana karena terencana dengan baik termasuk kebutuhan anggarannya. Pembiayaan dan anggaran sudah sesuai pula dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

(b) Kualitas dan kompetensi SDM yang makin meningkat

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) perangkat daerah Kemantren Gondomanan memang dapat menjadi kendala bagi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja. Namun keterbatasan kuantitas jika didukung dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ternyata mampu menjadi kekuatan potensial dan menghasilkan kinerja optimal. Melalui proses motivasi pembelajaran yang terus menerus maka Kemantren Gondomanan berhasil mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk merealisasikan program kegiatan yang direncanakan dan mencapai target yang ditetapkan.

(c) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan kinerja dalam pencapaian target yang ditetapkan. Sedangkan monitoring dan evaluasi merupakan alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan solusi yang tepat.

Guna mengefektifkan masa tahun anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan maka perencanaan yang telah disusun dalam bentuk RKA dan DPA SKPD Kemantren Gondomanan kemudian lebih didetailkan lagi. Tatakala kegiatan disusun sampai dengan level hari/tanggal pelaksanaan kegiatan dan target harian, sehingga semakin mempermudah dalam operasionalisasinya. Selain itu, secara simultan juga dilakukan monitoring dan evaluasi sesering mungkin sehingga meminimalisir celah terjadinya kesalahan, keterlambatan, atau penyimpangan. Apabila ditemui permasalahan dan hambatan pun dapat segera teridentifikasi dan dicarikan solusinya, agar tidak mengganggu upaya pencapaian target dan tujuan.

Dalam rangka penguatan sistem monitoring dan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan serta responsivitas gender di semua program/kegiatan, maka setiap Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) diharuskan menyusun kerangka acuan kerja (KAK), menyusun *Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement* (GAP/GBS) dan melakukan analisis resiko dalam bentuk dokumen Manajemen Risiko (MR). Selain itu, pada akhir tahun anggaran setiap PPTK diwajibkan menyusun laporan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) pegawai yang bersangkutan.

(d) Inovasi Sistem dan Prosedur Pelayanan

Dalam upaya mengakselerasi pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian tujuan maka suatu institusi harus terus berupaya mencari celah-celah inovasi yang bisa dilakukan. Selain adanya dorongan dari Pemerintah Kota untuk terus mengembangkan inovasi, inspirasi perubahan demi efisiensi dan terbaik melayani juga harus ditumbuhkan dalam diri setiap individu dalam organisasi.

Beberapa inovasi dan penyederhanaan sistem prosedur pelayanan di Kemantren Gondomanan tahun 2023 antara lain :

- <u>Penyempurnaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan)</u>

  Paket Komanan yang dilaunching pada bulan September 2019 dan mendapat sambutan positif, dukungan dan apresiasi dari segenap warga masyarakat serta pihak-pihak terkait, disempurnakan dengan mengevaluasi dan menyesuaikan SOP paket layanan dengan perubahan regulasi di tingkat yang lebih tinggi, situasi pasca pandemi, dan perkembangan teknologi informasi terkini.

- <u>Sosialisasi SOP pelayanan secara virtual</u>

  Untuk merespon keingintahuan masyarakat terhadap informasi prosedur baru pelayanan di masa pandemi, maka dilakukan sosialisasi secara virtual, mengingat kondisi pandemi tidak

memungkinkan untuk mengumpulkan warga guna diberikan informasi pelayanan secara langsung. Sosialisasi dilakukan dengan membuat video pendek berdurasi 3-5 menit berisi tentang SOP dan tatacara mengakses layanan. Video kemudian disebarluaskan dengan diunggah ke website dan media sosial Kemantren Gondomanan, serta dishare ke grup-grup *whatsapp* RT/RW dan warga.

- Pendampingan pelayanan

  Terhadap warga yang masih belum memahami prosedur pelayanan secara online, atau bagi warga yang memiliki keterbatasan dan kurang memahami penggunaan gadget maka dalam mengakses pelayanan bisa didampingi oleh petugas.

(e) Pemanfaatan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat dirasakan sangat membantu dalam mengakselerasi pencapaian target program dan kegiatan. Melalui aplikasi *Jogja Smart Services (JSS)* yang memuat ratusan macam SIM sangat memudahkan bagi warga masyarakat dan perangkat Kemantren Gondomanan dalam mengakses informasi, memberikan layanan, mengolah data, melakukan monitoring dan evaluasi, menyusun laporan, hingga menyampaikan publikasi sebagai wujud akuntabilitas. Selain itu pemanfaatan berbagai platform media sosial juga mendukung penyebarluasan informasi dan percepatan koordinasi.

(f) Penerapan *system reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai

Dalam rangka mendorong motivasi berkinerja dan semangat berprestasi maka dipandang perlu untuk menerapkan *system reward and punishment*. Bentuknya adalah pemberian reward berupa piagam penghargaan dan hadiah dari pimpinan organisasi (Mantri Pamong Praja) bagi pegawai yang dapat mencapai kinerja yang tinggi, dan hukuman/sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku jika pegawai tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan atau jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

2) Faktor Eksternal

(a) Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kemantren Gondomanan mulai dari tingkat terendah (RT, RW, kampung, kelurahan, kemantren) secara aktif dilibatkan dan berperan penting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Keterlibatan aktif dan intensif dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ini memberikan dampak positif berupa makin meningkatnya ketepatan perencanaan, ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi dan kualitas kegiatan.

(b) Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

Beberapa program yang terkait langsung dengan masyarakat, khususnya program pemberdayaan masyarakat, tentu harus didukung dengan partisipasi masyarakat itu sendiri, baik sebagai subyek maupun sasaran penerima manfaat kegiatan. Bahkan indikator nilai tingkat swadaya masyarakat ini menjadi cerminan tinggi rendahnya tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini bisa diwujudkan dalam beragam bentuk mulai dari kesediaan untuk merubah pola pikir dan budaya yang kurang produktif, peningkatan ketrampilan yang berkontribusi positif terhadap perekonomian, swadaya masyarakat dalam kegiatan dan pembangunan sarana prasarana umum, dan lain sebagainya.

Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan secara lebih inklusif dibangun melalui Musrenbang Tematik, dimana tahapan Musrenbang di tingkat kemantren diformat secara horisontal dengan membentuk 3 (tiga) klaster, yaitu klaster pembangunan prasarana fisik, klaster kesehatan, perempuan dan anak, dan klaster ekonomi sosial budaya. Melalui sistem klasterisasi tersebut diharapkan pembahasan dan penyusunan rencana jangka pendek menengah dan panjang dari masing-masing klaster dapat lebih fokus, intensif, holistik dan integratif.

7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Jika dirinci secara detail tidak seluruh kegiatan dapat dikatakan

berhasil walaupun capaian kinerja secara keseluruhan masuk kategori Sangat Tinggi. Meskipun demikian deviasi anggaran yang tergolong kecil ini tidak berpengaruh signifikan pada rata-rata umum capaian kinerja.

a. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Tercapainya target indikator kinerja program yakni terlaksananya Gelar Budaya Jogja secara kuantitatif maupun kualitatif berdampak pada peningkatan nilai swadaya masyarakat yang berupa dukungan keterlibatan Kampung dalam perhelatan peringatan Hari keistimewaan Yogyakarta. Secara implisit program/kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengangkat dan memperkuat posisi kampung sebagai institusi peninggalan sistem pemerintahan khas Yogyakarta di masa lalu yang coba difungsikan kembali di masa kini dengan memanfaatkan dana keistimewaan.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian target kinerja program, yakni nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP ditunjang oleh beberapa upaya antara lain :

a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara rutin dan intensif;
b) Tertib dalam pencatatan dan pendokumentasian kegiatan dan bukti dukung.
c) Penyampaian laporan dan administrasi kegiatan secara lengkap dan tepat waktu.
d) Respon dan tindak lanjut cepat dan tepat terhadap rekomendasi hasil evaluasi dan/atau permasalahan yang terjadi.

3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a) Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pernyataan kinerja karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan

pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban. Kegiatan pelayanan dengan Paket Komanan terus dikembangkan disesuaikan dengan perubahanregulasi pelayanan dan perkembangan teknologi terkini sehingga masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.

b) Gencarnya sosialisasi dan publikasi pelayanan di kecamatan yang dilakukan melalui berbagai media sosial seperti *website, facebook, instagram, youtube* dan bulettin Gondoarum menjadikan masyarakat makin memahami dan mendorong untuk makin aktif mengakses berbagai pelayanan dan informasi yang diberikan oleh Kemantren Gondomanan.

c) Dukungan teknologi informasi berupa aplikasi JSS juga semakin memudahkan sistem prosedur dan konektivitas interface pelayanan Kemantren Gondomanan dengan masyarakat.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a) Kegiatan pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan di kemantren maupun kelurahan telah melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaannya.

b) Partisipasi, dukungan, keterlibatan dan swadaya masyarakat yang cukup tinggi, sehingga sangat mendukung kelancaran kegiatan.

c) Adanya inovasi pengembangan kawasan terpadu KOMPAK CODE di RW 17 dan RW 18 Prawirodirjan yang tahun ini mencapai tahap penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana fisik menjadi tonggak penting untuk mengakselerasi pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat setempat.

b. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian pernyataan kinerja

1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Formasi pegawai Kemantren Gondomanan saat ini baru terpenuhi 74% dari kebutuhan sesuai hasil analisis jabatan, tentu ini belum memadai bagi organisasi Kemantren Gondomanan. Kekurangan personil terutama dirasakan di kelurahan mengingat adanya kebijakan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

merangkap Pejabat Pembuat komitmen (PPKom), untuk melaksanakan tugas dan pelimpahan kewenangan yang semakin besar dan kompleks serta alokasi anggaran yang lebih besar kepada kelurahan. Kebijakan ini telah berjalan beberapa tahun namun tidak/belum disertai dengan penambahan personil. Sesuai hasil analisis jabatan, sebagai konsekuensi pengangkatan Lurah sebagai KPA seharusnya didukung tim/pejabat pengelola keuangan dan kegiatan yang memadai, dimana sesuai ketentuan beberapa jabatan harus diisi oleh PNS/ASN. Pada kenyataannya sudah ada penambahan personil di kelurahan namun hanya diperbolehkan mengangkat tenaga teknis melalui belanja jasa orang perseorangan untuk membantu pelayanan dan administrasi umum kegiatan. Upaya lain dilakukan untuk meningkatkan segi kualitas melalui berbagai bimbingan teknis dan diklat peningkatan kompetensi pegawai. Meskipun demikian, ketika tuntutan beban kerja semakin bertambah maka kemampuan SDM yang ada pun masih dirasa kurang memadai.

2) Kegiatan yang bersifat “penjagaan”

Beberapa kegiatan di program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah khususnya yang bertujuan untuk pemeliharaan dan bersifat penjagaan (misal penggantian suku cadang, pembelian BBM) pada beberapa obyek sulit untuk diprediksi kebutuhannya (kapan perlu ganti suku cadang, penyerapan BBM yang kurang optimal karena mobilitas berkurang, dan sebagainya). Termasuk juga belanja pemakaian listrik/telepon yang tidak bisa tepat sesuai perkiraan dan pagu anggaran yang tersedia. Konsekuensi dari belanja semacam ini adalah target keuangan tidak bisa tercapai 100% (ada sisa anggaran), meskipun target fisik bisa tercapai 100%.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan

gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus melibatkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kemantren Gondomanan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS* (*Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements*) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

9. Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja

1) Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimtren

Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (Forkompimtren) yang terdiri dari Mantri Pamong Praja (selaku koordinator), Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Komandan Rayon Militer (Danramil), Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dibentuk dalam rangka mengemban misi bersama untuk bersinergi menciptakan masyarakat yang aman damai sejahtera sesuai bidangnya masing-masing. Untuk itu diperlukan mekanisme komunikasi, koordinasi, sinergi dan integrasi yang intensif dan efektif agar tujuan dan kepentingan bersama dapat diwujudkan. Beberapa contoh sinergitas yang telah dibangun antara lain :

- Keterlibatan Forkompimtren dalam program kado 17 GM bagi warga usia 17 tahun saat mengurus KTP diberikan bingkisan yang salahsatunya berisi buletin dengan materi yang disusun oleh tim Forkompimtren sebagai bekal informasi yang lengkap bagi remaja yang memasuki usia 17 tahun;
- keterlibatan UPT Puskesmas Gondomanan dan KUA kemantren Gondomanan dalam beberapa proses/prosedur administrasi kependudukan yang terangkum dalam Paket Komanan;
- Sinergitas Forkompimtren bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Petugas PKB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penanganan dan pencegahan kasus stunting, dalam bentuk kegiatan bersama antara lain edukasi kepada masyarakat tentang penanganan dan pencegahan stunting, pemberian bantuan pangan dan gizi, dan keterpaduan gerak dalam kegiatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kemantren Gondomanan;
- Sinergitas Forkompimtren dalam pengamanan proses menuju Pemilu Damai 2024 dan pengamanan perayaan hari-hari besar (Idul Fitri, Idul Adha dan Natal Tahun Baru).
- Sinergitas seluruh jajaran Forkompimtren bersama Tim Penggerak PKK, Bank Sampah dan elemen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Aksi 1124 Gondomanan Bersih untuk Jogja Istimewa;
- Kebersamaan dalam berbagai kegiatan seperti penanganan masalah sosial di wilayah Kemantren Gondomanan, olahraga dan pemantauan wilayah bersama tiap Jumat pagi, dan sebagainya.

2) Sinergitas dalam KOMPAK CODE

KOMPAK CODE (Kolaborasi Mewujudkan Pembangunan Kawasan Bantaran Sungai Code) adalah Inovasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman huni dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sekitar Bantaran Sungai Code Kelurahan Prawirodirjan. Inovasi KOMPAK CODE bertujuan untuk menata kawasan kumuh, meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi risiko bencana, menjadikan

kawasan nyaman huni, dan menambah Ruang Tebuka Hijau Publik (RTHP) sebagai paru-paru kota. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak antara lain : Kelurahan Prawirodirjan, CSR, Lembaga Masyarakat, Dinas PUPKP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Inovasi KOMPAK CODE dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2022, dan saat ini sudah sampai tahapan selesainya pembangunan prasarana fisik, yang akan dilanjutkan dengan pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pertanian perkotaan.

B. Realisasi Anggaran

1. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran Kemantren Gondomanan tahun 2023 sebesar 96,80% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 99,05%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98,95%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, terdapat 3(tiga) program dengan serapan anggara mencapai 100% yaitu : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran dan realisasi belanja yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.16

Anggaran dan Realisasi Belanja Kemantren Gondomanan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Reali sasi	Reali sasi(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Reali sasi(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Gelar Budaya Jogja	1 kali	1 kali	100	100.000.000	100.000.000	100
		Nilai Survey KepuasanMasyarakat	88,62	88,68	100,068	33.645.650	33.645.650	100
		Angka Swadaya Masyarakat	1.032.240.000	1.039.317.000	100,686	2.700.846.768	2.672.909.448	98,97
		Jumlah pelanggaran Perda	140	137	102,86	185.123.000	185.123.000	100
		Prosentase permasa-	100%	100%	100	58.975.000	68.975.000	100

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Reali sasi	Reali sasi(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Reali sasi(%)
		lahan terselesaikan						
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai SAKIP oleh Inspektorat	80(A)	86,47(A)	100	1.107.513.445.	1.095.938.	98,95
Jumlah						4.186.103.843	4.146.591.177	99.05
Total Belanja (dengan Belanja Pegawai)						8.411.902.84.	8.142.792.394	96.80

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan anggaran untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi sangat tinggi. Meskipun demikian ada beberapa komponen biaya yang memang tidak dapat diserap maksimal (100%) karena efisiensi, dengan tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas output yang dihasilkan. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja organisasi maka anggaran dan realisasi program-program dirinci lagi per kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diidentifikasi beberapa kegiatan yang penyerapannya tidak dapat optimal yang akan dianalisis pada sub bab berikutnya.

Tabel III.17

Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Belanja Non Pegawai	4.186.103.843	4.146.591.177	99,06%
1.	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100%**
	Kegiatan : Adat, Seni, Tradisi & Lembaga Budaya	100.000.000	100.000.000	100%
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100%
2.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.333.312.445**	**5.092.139.296**	**95,48%**
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.952.000	42.952.000	100%

	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.600.000	1.600.000	100%
	2) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	3) Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	4) Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	34.752.000	34.752.000	100%
	5) Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	6) Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000	1.800.000	100%
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	100%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.232.999.000	4.003.401.217	94,58%
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.225.799.000	3.996.201.217	94.57%
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.200.000	1.200.000	100%
	3) Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan	1.200.000	1.200.000	100%
	7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keua ngan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.200.000	1.200.000	100%
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	600.000	600.000	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000	600.000	100%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600.000	600.000	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	600.000	600.000	100%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.128.445	153.128.445	100%
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.755.500	3.755.500	100%
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.056.595	47.056.595	100%
	3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.290.000	24.290.000	100%
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.026.350	78.026.350	100%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.340.000	75.610.000	96,52%
	1) Pengadaan Mebel	12.340.000	12.340.000	100%
	2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.000.000	63.270.000	95,86%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.258.000	585.836.153	99,59%
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100%
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	90.170.000	87.788.153	97,36%
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.588.000	496.548.000	99,99%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.435.000	230.011.481	97,28%
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	99.135.000	93.350.368	94,16

	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.300.000	31.300.000	100%
	3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.000.000	105.361.113	99,40%
3.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**33.645.650**	**33.645.650**	100%
	Kegiatan : **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	8.200.000	8.200.000	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8.200.000	8.200.000	100%
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.445.650	25.445.650	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	25.445.650	25.445.650	100%
4.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**2.700.846.748**	**2.672.909.448**	**98,97%**
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.690.000	73.690.000	100%
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.690.000	73.690.000	100%
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.379.761.448	2.351.824.148	98,83%
	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Kelurahan	39.759.772	39.759.772	100%
	2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. Ngupasan	505.491.000	489.763.000	96,89%
	3) Pembangunan sarana dan Prasarana Kel. Prawirodirjan	525.190.000	522.908.700	99,57%
	4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan	854.436.500	854.075.500	99,96%
	5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan	449.389.000	439.822.000	97,87%
	6) Evaluasi Kelurahan	5.495.176	5.495.176	100%
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren	37.063.800	37.063.800	100%
	1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	22.063.800	22.063.800	100%
	2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.000.000	15.000.000	100%
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	210.331.500	210.331.500	100%
	1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28.750.000	28.750.000	100%
	2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	51.017.500	51.017.500	100%
	3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingk. Hidup	24.624.000	24.624.000	100%
	4) Pelatihan keluarga Tanggap Bencana Alam	3.550.000	3.550.000	100%
	5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	102.390.000	102.390.000	100%
5.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**185.123.000**	**185.123.000**	**100%**
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	185.123.000	185.123.000	100%

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	185.123.000	185.123.000	100%
6.	**Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum**	**58.975.000**	**58.975.000**	**100%**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.975.000	58.975.000	100%
	1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	14.375.000	14.375.000	100%
	2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.600.000	44.600.000	100%
B.	**Belanja Pegawai**	**4.225.799.000**	**3.996.201.217**	**94.57%**
	Jumlah	**8.411.902.843**	**8.142.792.394**	**96,80%**

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selain telah terlaksananya program dan kegiatan secara optimal, pada beberapa kegiatan juga telah dilakukan efisiensi sebagai berikut:

Tabel III.18

Data Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Kemantren Gondomanan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Belanja Non Pegawai	4.146.591.177	39.412.666	0,94%
1.	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100.000.000**	**0**	**0%**
	Kegiatan : Adat, Seni, Tradisi & Lembaga Budaya	100.000.000	0	0%
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	0	0%
2.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.092.139.296**	**241.173.149**	**4,52%**
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.952.000	0	0%
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.600.000	0	0%
	2) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.200.000	0	0%
	3) Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.200.000	0	0%
	4) Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	34.752.000	0	0%
	5) Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.200.000	0	0%
	6) Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000	0	0%

	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	0	0%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.003.401.217	229.597.783	5,42%
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.996.201.217	229.597.783	5,43%
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.200.000	0	0%
	3) Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200.000	0	0%
	4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.200.000	0	0%
	5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	0	0%
	6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan	1.200.000	0	0%
	7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.200.000	0	0%
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	600.000	0	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000	0	0%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600.000	0	0%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	600.000	0	0%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.128.445	0	0%
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.755.500	0	0%
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.056.595	0	0%
	3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.290.000	0	0%
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.026.350	0	0%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.610.000	2.730.000	3,41%
	1) Pengadaan Mebel	12.340.000	0	0%
	2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.270.000	2.730.000	4,13%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.836.153	2.421.847	0.42%
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	0	0%
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	87.788.153	2.381.847	2,64%
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.548.000	40.000	0,01%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.011.481	6.423.519	2,72%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	93.350.368	5.784.632	5,83%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.300.000	0	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.361.113	638.887	0,60%
3.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**33.645.650**	**0**	0%
	Kegiatan : **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	8.200.000	0	0%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	8.200.000	0	0%

	Pelayanan Umum			
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.445.650	0	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	25.445.650	0	0%
4.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**2.672.909.448**	**27.937.300**	**1,03%**
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.690.000	0	0%
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.690.000	0	0%
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.379.761.448	27.937.300	0%
	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan	39.759.772	0	0%
	2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. Ngupasan	505.491.000	15.728.000	3,11%
	3) Pembangunan sarana dan Prasarana Kel. Prawirodirjan	525.190.000	2.821.300	0,43%
	4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan	854.436.500	361.000	9,94%
	5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan	439.822.000	9.567.000	2,13%
	6) Evaluasi Kelurahan	5.495.176	0	0%
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren	37.063.800	0	0%
	1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	22.063.800	0	0%
	2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.000.000	0	0%
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	210.331.500	0	0%
	1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	28.750.000	0	0%
	2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	51.017.500	0	0%
	3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	24.624.000	0	0%
	4) Pelatihan keluarga Tanggap Bencana Alam	3.550.000	0	0%
	5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	102.390.000	0	0%
5.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	185.123.000	0	0%
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	185.123.000	0	0%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	185.123.000	0	0%
6.	**Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum**	**58.975.000**	**0**	0%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**58.975.000**	**0**	0%

	1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	14.375.000	0	0%
	2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	44.600.000	0	0%
B.	**Belanja Pegawai**	**3.996.201.217**	**229.597.783**	**5,43%**
	Jumlah	**8.142.792.394**	**269.110.449**	**3,20%**

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2023

Data efisiensi dalam hal ini merupakan data anggaran yang tidak/belum dapat dilaksanakan/direalisasikan dikarenakan sebab-sebab eksternal maupun internal. Selain itu dapat dijelaskan pula penyebab tidak/belum terserapnya anggaran untuk program/kegiatan tersebut. Meskipun demikian, inefisiensi tersebut nilainya cukup kecil sehingga tidak mengganggu tingkat pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu diidentifikasi pada pos anggaran dan kode rekening mana saja yang masih rendah capaiannya, untuk diantisipasi agar program/kegiatan dapat direalisasikan secara lebih efisien dan efektif.

Hasil identifikasi menunjukkan efisiensi yang cukup besar terjadi pada program-program :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serapan terendah sebesar 95,48% pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hal ini disebabkan karena penentuan anggaran dari BPKAD sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD .
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat efisiensi pada sub-sub anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang berupa paket kegiatan pembangunan fisik karena komponen-komponen biayanya menyesuaikan fluktuasi harga pasar, hasil negosiasi, dan tingkat ketepatan perencanaan dengan kondisi yang ada di lapangan.

C. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan

dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2023 Kemantren Gondomanan telah melakukan beberapa inovasi baik yang berupa inovasi baru maupun keberlanjutan dari inovasi yang telah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya antara lain sebagai berikut:

a. Inovasi Paket Pelayanan Komanan

   Inovasi ini telah berjalan sejak tahun 2020 namun masih dirasakan manfaatnya sehingga terus dikembangkan disesuaikan dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Inovasi ini juga sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pernyataan kinerja oleh karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban.

   Pelaksanaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan sesuai dengan aturan yang ada terkait pelayanan dengan maksud agar masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.

b. Sosialisasi Pelayanan secara Virtual

   Berupa pembuatan video pendek tentang sistem prosedur dan tatacara mengakses pelayanan, yang kemudian dipublikasikan melalui website, media sosial dan grup *Whatsapp* warga agar semua lapisan masyarakat semakin memahami dan semakin mudah dalam mengakses layanan.

c. Pendampingan Layanan

   Pendampingan oleh petugas diberikan kepada warga yang memiliki keterbatasan kemampuan mengakses teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung layanan. Beberapa warga berusia lanjut, difabel atau keluarga miskin kemungkinan menghadapi masalah dalam mengakses layanan berbasis online, sehingga perlu difasilitasi dan didampingi.

d. Inovasi Gondomanan Bersih Untuk Jogja Istimewa

Kegiatan Gondomanan Bersih untuk Jogja Istimewa adalah gerakan kerja bakti massal untuk menjaga lingkungan dengan melibatkan segenap stakeholders yang bersinergi secara harmonis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan partisipasi segenap stakeholders dalam menjaga dan mengelola kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Inovasi ini sudah berjalan beberapa tahun dan hasil nyata dari inovasi ini adalah Kemantren Gondomanan beberapa kali meraih predikat Kecamatan Adipura.

e. KOMPAK CODE (Kolaborasi Mewujudkan Pembangunan Kawasan Bantaran Sungai Code)

KOMPAK CODE adalah Inovasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman huni dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sekitar Bantaran Sungai Code Kelurahan Prawirodirjan. Inovasi ini dilatarbelakangi kondisi wilayah Bantaran Sungai Code wilayah Kampung Prawirodirjan yang memiliki karakteristik padat hunian, keterbatasan akses transportasi dan kumuh. Dalam penilaian risiko bencana di bantaran sungai code, terdapat beberapa bencana yang utama antara lain banjir, kebakaran, angin putting beliung dan gempa bumi. Secara sosial ekonomi, masyarakat di wilayah ini rata-rata berpenghasilan menengah ke bawah dengan mata pencaharian warung, jajan pasar, srabutan.

Inovasi KOMPAK CODE bertujuan untuk : menata kawasan kumuh, meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi risiko bencana, menjadikan kawasan nyaman huni, dan menambah Ruang Tebuka Hijau Publik (RTHP) sebagai paru-paru kota. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak antara lain : Kelurahan Prawirodirjan, CSR, Lembaga Masyarakat, Dinas PUPKP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Inovasi KOMPAK CODE dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2022, dan saat ini sudah sampai tahapan selesainya pembangunan prasarana fisik, yang akan dilanjutkan dengan pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pertanian perkotaan.

f. MAS JAKA PRAWIRO

Inovasi MAS JAKA PRAWIRO adalah program optimalisasi jalur evakuasi/inspeksi di pinggir Kali Code RW 14 dan RW 15 Kelurahan Prawirodirjan Kemantren Gondomanan. Inovasi ini merupakan bagian dari kerangka KOMPAK CODE dengan fokus pengembangan jalur inspeksi sepanjang bantaran Sungai Code yang lebih tertata, aksesible, sekaligus berfungsi optimal sebagai jalur untuk memantau aliran sungai dan mengurangi risiko bencana yang sewaktu-waktu mengancam kawasan tersebut.

g. DASI BUKEMAN

Inovasi DASI BUKEMAN (Digitalisasi Arsip Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) adalah upaya untuk mengelola dan menyimpan dokumen/data umum kepegawaian secara lebih aman, tertib dan teratur melalui proses digitalisasi. Sebagaimana diketahui, data dan dokumen umum kepegawaian sangat penting untuk keberlangsungan organisasi dan karir pegawai. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah pencarian data/dokumen apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, menghemat tempat penyimpanan, dan mengamankan dokumen agar tidak mudah rusak/hilang. Untuk tahap awal dokumen yang didigitalisasikan adalah dokumen kepegawaian, berita acara rekonsiliasi barang/aset, dan asli/salinan surat keputusan Mantri Pamong Praja. Tahap selanjutnya diupayakan dokumen keuangan dan dokumen lainnya juga akan didigitalisasi dan disimpan dalam google drive.

2. Prestasi

Kemantren Gondomanan selama kurun waktu tahun 2023 telah menorehkan beberapa prestasi sebagai berikut :

a. Kemantren Gondomanan meraih predikat sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Daerah DIY pada bulan Agustus 2023;
b. Kemantren Gondomanan meraih Peringkat IV Lomba Evaluasi Kinerja Kemantren tingkat Kota Yogyakarta pada bulan Oktober 2023;

c. Kemantren Gondomanan meraih Peringkat VIII Perangkat Daerah dengan nilai Akuntabilitas Kinerja A dengan nilai SAKIP 86,47 pada bulan Desember 2023.
d. Kemantren Gondomanan (diwakili RW 12 Kelurahan Prawirodirjan) meraih Peringkat I Lomba Kampung KB (Keluarga Berkualitas) Tingkat DIY pada bulan Maret 2023.
e. Kafilah Kemantren Gondomanan meraih Juara Umum Lomba MTQ Tingkat Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2023.
f. Juara I Lomba Pemuda Pelopor Tingkat Kota Yogyakarta Bidang Pendidikan atas nama Dhea Alifia Putri Widowati (RW 15 Kel. Prawirodirjan) pada bulan Agustus 2023.
g. Juara I Lomba Pemuda Pelopor Tingkat DIY Bidang Pendidikan atas nama Dhea Alifia Putri Widowati (RW 15 Kel. Prawirodirjan) pada bulan September 2023
h. Juara I Lomba PSM Berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta atas nama Karman Among Wibowo (RW 11 Kel. Prawirodirjan) pada bulan September 2023
i. Kemantren Gondomanan meraih Juara III Lomba Living Museum Tingkat Kota Yogyakarta pada bulan September 2023.
j. Kemantren Gondomanan (diwakili Kelurahan Prawirodirjan) menjadi finalis Kampung Harmoni Tingkat Kota Yogyakarta.
k. Bank Sampah Ngudi Resik Gondomanan meraih Juara I Lomba Lampion Anugrah Lingkungan Tingkat Kota Yogyakarta.
l. Bank Sampah Sejahtera Gondomanan meraih predikat Bank Sampah Legend dalam Anugrah Lingkungan Tingkat Kota Yogyakarta.
m. Bank Sampah Gangsal Gondomanan meraih Juara Harapan I Lomba Cerdas Cermat dalam Anugrah Lingkungan Tingkat Kota Yogyakarta.
n. Kelurahan Prawirodirjan meraih Peringkat III kategori Kelurahan dalam Pemilihan Gender Champion Tingkat Kota Yogyakarta.

D. Tindak Lanjut Rekomendasi LKIP Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Inspektorat Kota Yogyakarta dengan nomor : X.713/81/E.AKIP/B/VI/2023 tertanggal 12 Juni

2023, nilai AKIP yang diperoleh Kemantren Gondomanan untuk tahun 2022 adalah sebesar **86,47** atau berada pada predikat **A (Sangat Baik**).

Dari hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 ada beberapa catatan dan rekomendasi terhadap LKIP Kemantren Gondomanan yang kemudian menjadi komitmen seluruh entitas organisasi Kemantren Gondomanan untuk menindaklanjutinya. Komitmen ini merupakan upaya terus menerus yang dilakukan untuk menuju keadaan dan mencapai kinerja yang lebih baik lagi.

Tindaklanjut rekomendasi terhadap LKIP tahun 2022 dilaksanakan sejak diterimanya hasil penilaian LKIP oleh Inspektorat. Mantri Pamong Praja segera mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan. Dengan demikian potensi kesalahan dan keterlambatan dapat segera diminimalkan bahkan ditiadakan.

Tabel III.18

Rekomendasi Inspektorat terhadap LKIP 2022 dan Tindaklanjutnya

No.	Komponen	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindaklanjut	Bukti Dukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan Kinerja bobot :30% nilai 29,36	Seluruh dokumen perencanaan telah tersedia dengan lengkap, memenuhi standar yang baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	---	---	---
2	Pengukuran Kinerja bobot :30% nilai : 29,36	Terdapat kegiatan dan sub kegiatan pada TW II yang belum mencapai target TW II	Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai target tiap triwulan pada tahun berjalan.	Memperkuat monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan mengadakan rakor monev setiap bulan dan insidentil.	Notulensi rakor monev capaian kinerja
3	Pelaporan Kinerja bobot :15% nilai : 13,59	Pendokumentasian proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi kinerja berkala sebagai bentuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja belum optimal (dokumen-tasi tindak lanjut dalam Berita Acara Desk Timbal Balik belum lengkap).	Meningkatkan dokumentasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dalam Berita Acara Desk Timbal Balik.	Mendokumentasikan BA Desk Timbal Balik dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi secara kontinyu.	BA Desk Timbal Balik Triwulan I-IV tahun 2023

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot :25% nilai 14,19	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, namun setiap komponen akuntabilitas kinerja masih dievaluasi secara terpisah dan belum sesuai dengan Permenpan RB No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Permenpan RB No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Memperkuat monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan mengadakan rakor monev setiap bulan dan insidentil.	Notulensi rakor monev capaian kinerja

Sumber : Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022.

Tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

a) Meningkatkan dokumentasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dalam Berita Acara Desk Timbal Balik.

b) Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sesuai target tiap triwulan pada tahun berjalan.

c) Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis dalam tahun 2023 sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kemantren Gondomanan telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Baik pada indikator sasaran maupun pada indikator kinerja program keduanya menunjukan pencapaian target yang sangat baik. Hal itu menunjukan segala upaya yang dilakukan Kemantren Gondomanan secara umum dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target.

Pelaksanaan kinerja Kemantren Gondomanan yang dilaksanakan oleh aparat kemantren tidak lepas dari sinergitas antara masyarakat, *stakeholders* se-Kemantren Gondomanan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, dan OPD Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait langsung dengan kinerja Kemantren Gondomanan. Untuk itu koordinasi antar lini harus terus ditingkatkan sehingga hasil pencapaian tujuan dan kinerja organisasi pada tahun yang akan datang akan semakin baik.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan paparan data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab III akan dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondomanan pada tahun-tahun yang akan datang. Disamping itu, beberapa rekomendasi terhadap laporan LKIP tahun sebelumnya (2022) juga menjadi perhatian dalam menentukan tindaklanjut untuk upaya perbaikan.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja Kemantren Gondomanan dan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan simultan sebagai upaya untuk antisipasi dan pemecahan masalah atau hambatan yang dapat

mempengaruhi jalannya kinerja instansi.

3. Memperkuat koordinasi, sinergi dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesamaan persepsi dan gerak dalam menjalankan visi dan misi instansi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang Kinerja Kemantren Gondomanan Tahun Anggaran 2023 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan
Lampiran 2	Perencanaan Strategis (Matriks Renstra Lima Tahun)
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Lampiran 4	Pohon Kinerja
Lampiran 5	Pengukuran Kinerja Triwulan I-IV (print SIM e-LAKIP)
Lampiran 6	Rencana Aksi (print dari e-LAKIP)
Lampiran 7	Penghargaan yang Pernah Diterima
Lampiran 8	Tabel I.7 Data Sarana dan Prasarana Kemantren Gondomanan
Lampiran 9	Tabel I.8 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kemantren Gondomanan Tahun 2023
Lampiran 10	Berita Acara Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan se Kemantren Gondomanan Tahun 2023
Lampiran 11	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Lampiran 12	Rekapitulasi Laporan Swadaya Murni Kelurahan Tahun 2023
Lampiran 13	Rekapitulasi Laporan Kegiatan Tramtibum
Lampiran 14	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
Lampiran 15	Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2022
Lampiran 16	Matriks Cascading SKP Tahun 2023
Lampiran 17	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Instansi Sejenis
Lampiran 18	Daftar Nominatif Pegawai Kemantren Gondomanan Tahun 2023
Lampiran 19	Berita Acara Forum OPD Kemantren Gondomanan Tahun 2023
Lampiran 20	Berita Acara Review Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2023-2026